

# LKJIP

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK,  
DAN PERSANDIAN



TAHUN  
20  
25

KABUPATEN BLITAR  
" BERDAYA & BERJAYA "

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025, sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang aplikasi informatika, komunikasi publik, pengelolaan data statistik, serta keamanan informasi dan persandian.

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari jajaran pemerintah daerah, mitra kerja, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian, tantangan, serta upaya yang perlu dilakukan ke depan. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Blitar, 26 Januari 2026  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian



**AGUNG WICAKSONO, S.E., M.M.**  
Pembina TK.I / IV.b  
NIP. 197610232002121008



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sepanjang Tahun 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar telah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan. Pada sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, indikator nilai SAKIP perangkat daerah berhasil dicapai dengan skor **72,5 (kategori BB)**. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas kinerja telah berjalan sesuai standar evaluasi pemerintah daerah, dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang semakin baik.

Sementara itu, pada sasaran **Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE**, capaian indikator menunjukkan progres positif. Nilai Tata Kelola SPBE ditetapkan dengan target **2.50** dan berhasil direalisasikan sesuai harapan dengan nilai **3.30** mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, indikator Nilai Layanan SPBE dengan target **4.00** juga mampu direalisasikan dengan memperoleh nilai **4.26**, yang menunjukkan bahwa layanan publik berbasis digital semakin terintegrasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Tata kelola dan Layanan SPBE merupakan dua dari beberapa domain yang menjadi penilaian **Indeks SPBE Kabupaten Blitar** dimana Tahun 2025 memperoleh Nilai **3.88** dengan kategori **"Sangat Baik"**. Merupakan capaian luar biasa bagi pemerintah dan akan terus menciptakan digitalisasi pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang tinggi, pelaksanaan program tidak lepas dari sejumlah kendala. Keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam mendukung pengembangan sistem keamanan informasi dan integrasi layanan digital. Kapasitas SDM belum merata, khususnya di bidang keamanan siber dan analisis data statistik, sehingga memerlukan peningkatan kompetensi berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur jaringan di beberapa wilayah belum optimal, yang berdampak pada keterlambatan pelayanan berbasis

elektronik. Di sisi lain, koordinasi lintas perangkat daerah masih perlu diperkuat agar data dan layanan dapat lebih terpadu.

Menghadapi kendala tersebut, langkah ke depan yang akan ditempuh meliputi optimalisasi anggaran dengan fokus pada program prioritas, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berjenjang dan sertifikasi, serta penguatan infrastruktur TIK melalui perluasan jaringan dan pemeliharaan sistem. Dinas Kominfotiksan juga akan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keterpaduan data dan layanan publik, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan capaian kinerja sesuai target dan mempercepat tindak lanjut atas kendala yang dihadapi.

Dengan capaian kinerja yang tinggi dan langkah tindak lanjut yang terarah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjaga konsistensi peningkatan akuntabilitas kinerja sekaligus memperkuat tata kelola dan layanan SPBE sebagai fondasi transformasi digital pemerintahan.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	7
BAB I .....	8
PENDAHULUAN .....	8
A.    Penjelasan Umum Organisasi .....	8
B.    Aspek Strategis Organisasi .....	13
C.    Dasar Hukum .....	23
D.    Sistematika .....	26
BAB II .....	27
PERENCANAAN KINERJA .....	27
A.    Perjanjian Kinerja Tahun .....	27
B.    Perencanaan Anggaran Tahun .....	29
BAB III .....	30
AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
A.    Capaian Kinerja Organisasi .....	30
B.    Realisasi Anggaran .....	92
BAB IV .....	95
PENUTUP .....	95
A.    Kesimpulan .....	95
B.    Rencana Tindak Lanjut .....	98
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	101



## DAFTAR TABEL

1.1.	Data ASN Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar Tahun 2025 .....	11
1.2.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .....	12
1.3.	Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tabel.....	16
1.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 .....	20
1.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025 .....	22
2.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	28
2.2.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	28
3.1.	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	31
3.2.	Perkembangan kinerja sasaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 .....	33
3.3.	Pencapaian kinerja sasaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap target akhir Renstra .....	33
3.4.	Perbandingan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tingkat Provinsi Jawa Timur .....	34
3.5.	Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan .....	36
3.6.	Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE .....	41
3.7.	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE Tahun 2025 .....	45
3.8.	Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE .....	46
3.9.	Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE terhadap target akhir Renstra.....	47

3.10. Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional .....	48
3.11. Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE .....	53
3.12. Indeks Kesalehan Sosial Menurut Kecamatan .....	65
3.13. Penanganan Insiden Siber di Pemerintah Kabupaten Blitar selama 2025.....	78
3.14. Penanganan <i>Malware</i> di Kab. Blitar .....	85
3.15. Penanganan Kerentanan Sistem Elektronik .....	86
3.16. Edukasi dan Pelatihan.....	88
3.17. Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE.....	88
3.18. Realisasi Keuangan .....	92
4.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	95
4.2. Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja.....	96
4.3. Rencana Tindak Lanjut .....	99



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Tujuan dan Sasaran Misi 3 .....	13
Gambar 1.2. Cascading Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	23
Gambar 3.1. Gambat Bobot Penilaian SPBE Tahun 2025.....	48
Gambar 3.2. LHP SPBE Tahun 2025 .....	50
Gambar 3.3. Dokumen Penyusunan ICOR Kab. Blitar Tahun 2025 .....	62
Gambar 3.4. Dokumen Laporan Akhir IKLI Kab. Blitar Tahun 2025.....	63
Gambar 3.5. Indeks Kesalehan Sosial Kab. Blitar Tahun 2025 .....	64
Gambar 3.6. Survei IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025 .....	66
Gambar 3.7. Kajian NTP Kab. Blitar Tahun 2025 .....	68
Gambar 3.8. Metode Pendekatan P-D-C-A .....	73
Gambar 3.9. Kerangka Sistem Manajemen Keamanan Informasi .....	75



## **BAB I PENDAHULUAN**

### ***A. Penjelasan Umum Organisasi***

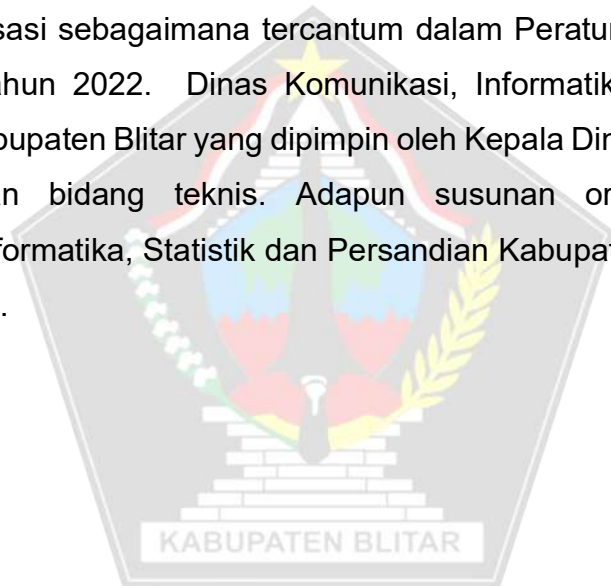
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu, Urusan bidang Komunikasi dan Informasi, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dan Keamanan Informasi.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

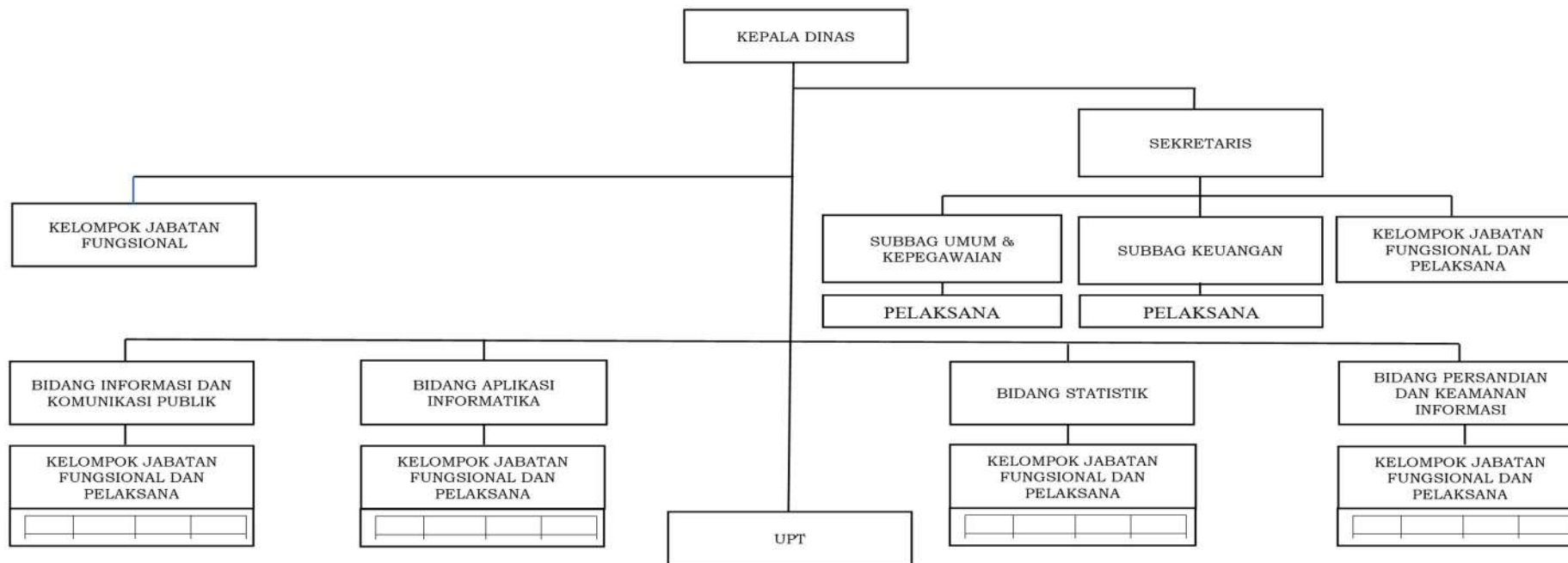
1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bitar dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;

- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sesuai Peraturan Perundang-undangan
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
- f. Pelaksanaan Tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.



Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022.



BUPATI BLITAR

*ttd*

.....

Sumber: JDIH, 2022



Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar didukung Sumber Daya Manusia ASN sebanyak 50 Orang yang terdiri dari PNS 26 Orang dan PPPK 25 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1.  
Data ASN Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Administrator	5 Orang
3	Pengawas	2
4	Pelaksana	11
5	Jabatan Fungsional Ahli Muda	6
6	Jabatan Fungsional Pertama	2
7	PPPK	9
8	PPPK Paruh Waktu	14
9	Non ASN	-
	<b>Total</b>	<b>50 Orang</b>

Sumber: Dokumen Kepegawaian Dinas Kominfotiksan, 2026

Berdasarkan Gender, Komposisi pegawai di Lingkungan dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar pada bulan Agustus 2025, sebagai berikut:

1. Laki-laki sebanyak 34 orang
2. Perempuan sebanyak 16 orang

Tabel 1.2.  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Uraian	Golongan/PNS								Jumlah		Total
		I		II		III		IV		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Kepala Dinas							1		1		1
2	Sekretariat							1		1		1
3	Kepala Bidang Aplikasi Informatika							1		1		1

No	Uraian	Golongan/PNS								Jumlah		Total	
		I		II		III		IV		L	P		
		L	P	L	P	L	P	L	P				
4	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik							1		1		1	
5	Kepala Bidang Data dan Statistik								1		1	1	
6	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi								1		1	1	
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						1				1	1	
7	Kepala Sub Bagian Keuangan						1				1	1	
8	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda					2					2	2	
9	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama					2	1				2	1	3
10	Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda					2					2	2	
11	Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Pertama					1					1	1	
12	Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Pertama					1					1	1	
13	Pelaksana			1		6	3				7	3	10
14	PPPK					3	6				4	6	9
15	PPPK Paruh Waktu										11	3	14
<b>Total</b>										<b>34</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	

Sumber: Dokumen Kepegawaian Dinas kominfotiksan, 2026

## B. Aspek Strategis Organisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Blitar yaitu pada Misi ke-3 yaitu

*"Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat"*

Gambar 1.1. Kerangka Tujuan dan Sasaran Misi 3

TUJUAN	SASARAN					
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola & Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS SPBE/ INDEKS PEMERINTAHAN DIGITAL	INDEKS SISTEM MERIT	SKOR SAKIP	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	INDEKS INOVASI DAERAH

Sumber: Dokumen RPJMD 2025-2029 Kab. Blitar, 2025

Dalam mencapai misi ke-3, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai berikut:

**Tujuan** : Terwujudnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

**Sasaran** :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Sesuai dengan sasaran tujuan RPJMD dan indikatornya terlihat jelas bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendukung pencapaian Tujuan ke-3 dengan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah sebagai berikut:

## 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai indikator sasaran pembangunan daerah dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan indikator tujuan perangkat daerah yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah dengan sasaran Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi.

## 2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Adapun indikator sasaran pembangunan daerah yang relevan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar yaitu:

### a. Indeks SPBE/ Indeks Pemerintah Digital

Untuk mencapai Indikator Sasaran Pembangunan Daerah ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan indikator tujuan dengan sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi dengan berdasarkan dua Indikator Sasaran Nilai Aspek Teknologi Digital dan Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah.
- 2) Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorl sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia berdasarkan Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
- 3) Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Indikator Sasaran Indeks KAMI (Keamanan Informasi).

b. Skor SAKIP Pemerintah Daerah

Untuk mencapai Indikator sasaran pembangunan daerah ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan indikator tujuan perangkat daerah yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien berdasarkan indikator sasaran Skor SAKIP Perangkat Daerah hasil Evaluasi dari TIM Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, diuraikan permasalahan pembangunan/issue strategis utama yang dihadapi perangkat daerah sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yaitu:



Tabel 1.3.

## Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Infrastruktur TI	Belum tercukupinya sarana dan prasarana TI	<p>kesenjangan literasi digital (sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan literasi digital untuk memanfaatkan layanan elektronik pemerintah)</p> <p><i>Peran Kominfo :</i> Mengembangkan program literasi digital, pelatihan komunitas, dan sosialisasi anti-hoaks.</p>	Percepatan transformasi digital global	Akselerasi Implementasi SPBE/Pemdigi	Belum optimalnya pelayanan publik digital daerah	Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemerataan kapasitas Literasi Digital bagi ASN
		<p>Perlunya perbaikan sistem pemerintahan sehingga lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan</p>	<p><b>Isu:</b> Percepatan digitalisasi di seluruh dunia menuntut pemerintah daerah untuk segera beradaptasi dengan pelayanan publik digital yang terintegrasi.</p>	<p><b>Isu:</b> Pemerintah pusat mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan melalui SPBE sebagai bagian dari reformasi birokrasi tematik.</p>	<p><b>Isu:</b> Banyak layanan publik di daerah belum terdigitalisasi atau belum terintegrasi antarsistem, sehingga menimbulkan inefisiensi</p>	Cakupan Pelayanan Publik berbasis Informasi Digital Belum Optimal

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			<p><b>Implikasi bagi Diskominfo:</b> Harus mempercepat pembangunan infrastruktur TIK, layanan publik berbasis digital, dan interoperabilitas sistem pemerintah.</p>	<p><b>Implikasi untuk Diskominfo:</b> Harus berperan sebagai koordinator pelaksanaan SPBE di daerah, menyiapkan arsitektur SPBE, dan melakukan integrasi sistem.</p>	<p><b>Implikasi untuk Diskominfo:</b> Mendorong digitalisasi layanan dan integrasi sistem dalam kerangka SPBE serta membangun Mal Pelayanan Publik Digital.</p>	<p>Optimalisasi dan perluasan Ruang Internet Gratis (Free Wifi Zone) bagi masyarakat, pelajar dan UMKM</p>
			<p><b>Relevansi Global:</b> Munculnya <i>smart governance, e-government, dan smart city</i> sebagai standar internasional dalam pelayanan publik.</p>	<p>Terkait dengan: Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dan PermenPANRB tentang Evaluasi SPBE.</p>		<p>Integrasi Smart City dengan Berbagai Sektor khususnya Layanan Publik, Promosi dan Branding (DPMPPTSP, Pariwisata, Pendidikan dan Kesehatan)</p>
Pengelolaan Informasi Publik	Belum tersedianya Portal Berita Daerah/Media Center Pemda					<p>Kualitas dan kuantitas Publikasi Informasi untuk Prpmosi dan Branding Belum Optimal</p>
Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil mengidentifikasi serta mengklarifikasi sebanyak 1.923	Literasi digital di masyarakat masih rendah dan perlunya pembentukan, penguatan tim anti hoax	-	Perkembangan teknologi dan isu-isu yang terus berkembang	Penguatan komunikasi dan informatika melalui pembentukan Kementerian Komunikasi dan Digital	Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki klinik hoax	Peningkatan literasi digital, pembentukan tim anti hoax, dan adopsi klinik hoax

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
konten hoaks, berita bohong dan informasi palsu sepanjang tahun 2024, dan akan terus ada/berkembang pada tahun-tahun berikutnya						
Penerapan Sistem Keamanan Siber di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keamanan Informasi Belum Terstruktur Secara Optimal					Peningkatan Indeks Keamanan Informasi
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis digital yang Belum Mencapai Optimalitas	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial belum Optimal	Rendahnya integrasi dan keamanan sistem layanan digital pemerintahan di tengah tuntutan global akan tata kelola yang transparan dan efisien, yang menghambat optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan pelayanan publik	Rendahnya integrasi dan penerapan teknologi terbaru terkait layanan digital untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik menuju pemerintah digital
		Tingkat kemiskinan yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pelatihan	Kesenjangan infrastruktur digital dan rendahnya literasi digital, yang	Infrastruktur dan literasi digital rendah	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi	Keterbatasan infrastruktur dan SDM TIK, belum terwujudnya

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			menghambat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan akses masyarakat terhadap layanan publik digital.			ekosistem pemerintah digital dan rendahnya literasi digital
Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kualitas data daerah sesuai prinsip SDI</li> <li>- Belum optimalnya tata kelola data pemerintah daerah sesuai tahapan penyelenggaraan SDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial belum optimal</li> <li>- Tingkat kemiskinan masih tinggi</li> </ul>	Perkembangan teknologi. Teknologi akan menggantikan 40 persen pekerjaan saat ini.	<p>Isu Pemerintahan dan Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif</li> <li>- Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar</li> <li>- Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi</li> <li>- Penguatan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik</li> </ul>	Pemanfaatan data yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan efektif serta penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran

Sumber: Dok. Renstra 2025-2029 Dinas Kominfotiksan, 2025

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran RPJMD tersebut di atas, serta berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah pada tabel 1.3. di atas, maka ditetapkan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektoral serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi dengan 5 (Lima) sasaran yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi, Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia, Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. yang diukur melalui indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 1.4.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

<b>NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektoral serta	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Keamanan Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (ditetapkan menggunakan Pemdigi)/Indeks Pemerintah Digital	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Nilai Aspek Teknologi Digital (skor)
				Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (skor)
			Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.	Skor SAKIP Perangkat Daerah

Sumber : Dinas Kominfotiksan, 2025

Namun dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar masih menetapkan IKU berdasarkan Renstra 2021-2026 karena sudah mulai dilaksanakan pada tahun berjalan sedangkan masa transisi masih dalam proses perencanaan. Adapun IKU yang dilaksanakan masih selaras dengan RPJMD 2025-2029 berdasarkan tabel berikut ini:

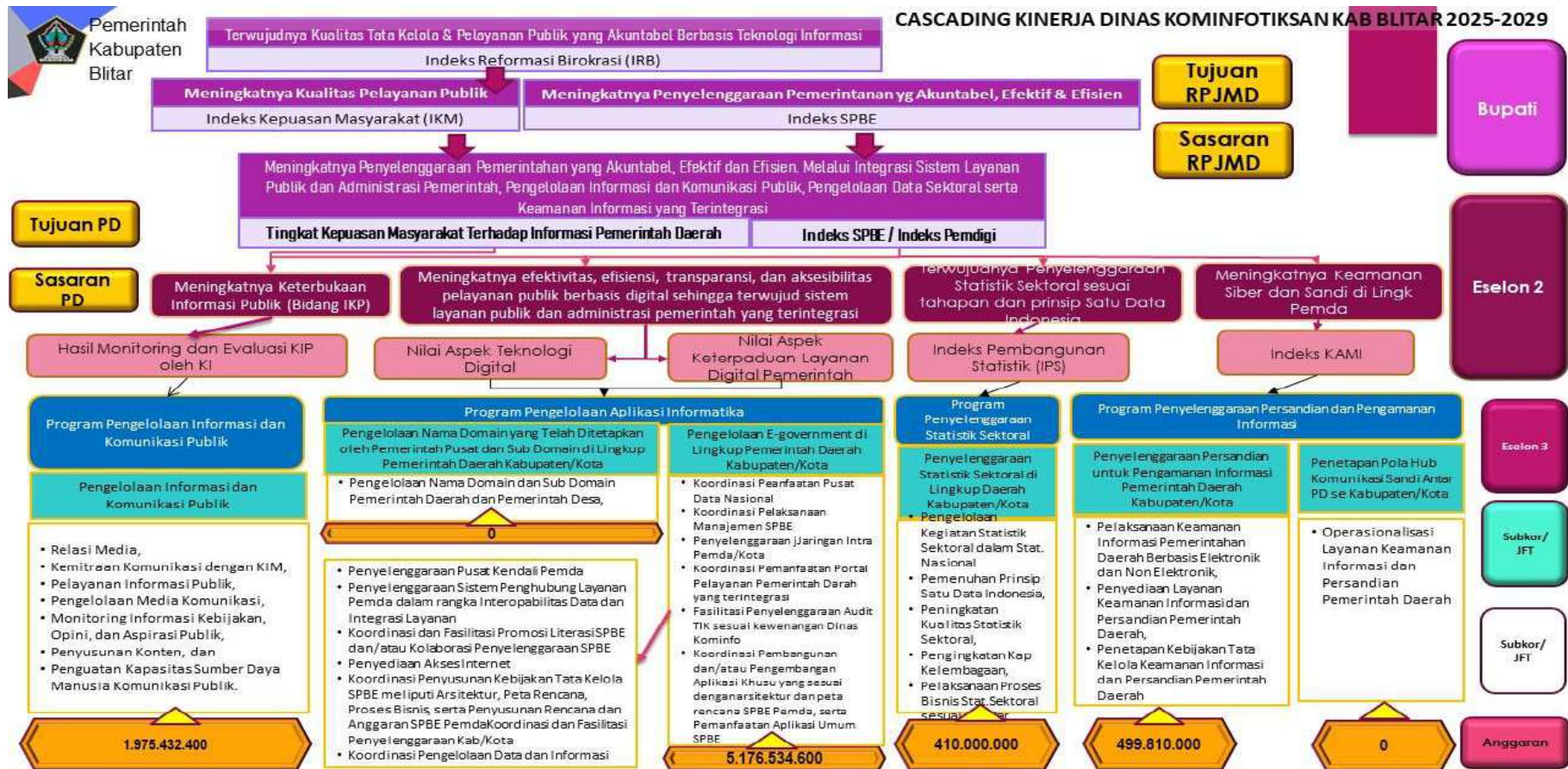
Tabel 1.5.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (72.5)
		Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	2.50
			Nilai Layanan SPBE	4.0

Berdasarkan kedua tabel IKU ini, terdapat penyesuaian arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tercermin dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Blitar dan RENSTRA 2025-2029 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, dimana Tahun 2025 sasaran perangkat daerah masih tetap mengacu pada Sasaran Kinerja sebelumnya yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Meningkatkan Tata Kelola serta Layanan SPBE. Konsistensi tersebut menegaskan bahwa sasaran dimaksud merupakan prioritas strategis yang bersifat fundamental dan berkelanjutan, sehingga keberadaannya tidak terpengaruh oleh dinamika perubahan dokumen perencanaan.

*Logical Framework* keselarasan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam cascading berikut:

Gambar 1.2. Cascading Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025



### ***C. Dasar Hukum***

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 114/E).

## ***D. Sistematika***

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak Lanjut

### **LAMPIRAN**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

### ***A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025***

---

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan target sasaran Perangkat Daerah yang perlu dicapai dan direalisasikan melalui penganggaran pada setiap tahunnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang disusun berdasarkan target kinerja tahunan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029. Pada awal tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPd Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan surat tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada perubahan perjanjian kinerja yang dimungkinkan menggambarkan kinerja yang berbeda karena adanya perubahan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan. Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72,5)
2	<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE</b>	Nilai Tata Kelola SPBE	2.5
		Nilai Layanan SPBE	4.0

Sumber : Dinas Kominfotiksan, 2025

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72,5)
2	<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE</b>	Nilai Tata Kelola SPBE	2.5
		Nilai Layanan SPBE	4.0

Sumber : Dinas Kominfotiksan, 2025

Meskipun terdapat penyesuaian arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tercermin dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Blitar dan RENSTRA 2025-2029 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, pada sasaran perangkat daerah masih tetap mengacu pada perjanjian kinerja lama yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Meningkatkan Tata Kelola dan Layanan SPBE**. Konsistensi tersebut menegaskan bahwa kedua sasaran dimaksud merupakan prioritas strategis yang bersifat fundamental dan berkelanjutan, sehingga keberadaannya tidak terpengaruh oleh dinamika perubahan dokumen perencanaan. Dengan demikian, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kesinambungan arah kebijakan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

transparan, akuntabel, serta peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik yang mendukung transformasi digital daerah menjadi pemerintah digital sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.

### ***B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025***

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.905.827.470 (tiga belas milyar sembilan ratus lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3.  
Rincian Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.586.607.499,00
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 2.527.626.971,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 4.857.391.500,00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 573.998.900,00
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 360.202.600,00
<b>Total Anggaran</b>			<b>Rp. 13.905.827.470</b>

Sumber : Dinas Kominfotiksan, 2025

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

#### ***A. Capaian Kinerja Organisasi***

---

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja berdasarkan sasaran yang sudah direncanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025.

## 1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu skor SAKIP Perangkat Daerah. Definisi operasional dari skor SAKIP Perangkat Daerah adalah suatu penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang akuntabel, efektif, dan efisien diukur melalui persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai minimal 'B' untuk mendapatkan nilai "baik" dalam akuntabilitas kinerja melalui evaluasi SAKIP, persentase capaian indikator kinerja utama sesuai target, serta rasio efisiensi penggunaan anggaran terhadap output yang dihasilkan."

Rata-rata capaian kinerja / Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut:

Tabel 3.1  
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72,5)	BB (72,5)	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					100%

Sumber: Dinas Kominfo, 2025

Pencapaian target ini menandakan bahwa perangkat daerah tidak hanya mampu memenuhi standar yang telah ditentukan, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Akuntabilitas tercermin dari konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan yang sesuai dengan regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas tampak dari keberhasilan mencapai indikator kinerja utama yang relevan dengan tujuan pembangunan daerah. Sementara itu, efisiensi terlihat dari kemampuan memaksimalkan hasil dengan penggunaan anggaran dan sumber daya secara tepat guna.

Lebih jauh, capaian ini memberikan pesan penting bahwa perangkat daerah telah bergerak ke arah tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melampaui target merupakan harapan yang besar sebagai wujud yang bukan hanya soal angka, tetapi juga menunjukkan adanya budaya kerja yang berorientasi pada hasil, inovasi dalam pelaksanaan program, serta sinergi antarunit kerja. Hal ini menjadi harapan yang apabila terwujud maka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena kinerja yang ditunjukkan bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan capaian 100%, perangkat daerah dapat dikatakan telah berhasil menegakkan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Keberhasilan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan standar kinerja di masa mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa capaian yang memenuhi target ini tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi pola kerja berkelanjutan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Realisasi kinerja Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024 yang memperoleh nilai lebih rendah daripada Tahun 2023. Dari Tahun 2023 hingga 2025 memperoleh nilai yang fluktuatif, hal ini disebabkan oleh beberapa hal berdasarkan laporan evaluasi akuntabilitas kinerja dari Inspektorat. Berdasarkan data capaian kinerja yang ada, secara keseluruhan menunjukkan komitmen yang kuat dari tahun ke tahun untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2024, perangkat daerah mampu melakukan perbaikan di Tahun 2025 secara signifikan sehingga di Tahun 2025 telah memenuhi target capaian dengan skor 72,50. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa perangkat daerah terus berusaha semakin matang dalam melakukan pengelolaan kinerja, berorientasi pada hasil, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan

berkelanjutan. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 s.d. 2025.

Tabel 3.2  
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72,5)	BB (72,5)	B (68,9)	BB (77,56)

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Selain itu, capaian kinerja Tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 94,77 % dari target tahun terakhir Renstra atau telah sesuai dan terus melakukan upaya untuk mencapai target akhir Renstra pada Tahun 2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.3  
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (76,5)	BB (72,5)	94,77%

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja namun masih perlu perbaikan dan peningkatan yang lebih baik lagi. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.4  
Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	(BB) 72,5	Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur : A

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Penguatan Perencanaan dan Dokumen Kinerja, melalui penyusunan Renstra, Renja dan RKA sesuai dengan standar akuntabilitas (SAKIP) yang telah disinkronisasikan dengan RPJMD Kabupaten Blitar Periode 2025-2029.
2. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam pengumpulan data, melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap capaian kinerja dan anggaran setiap bidang. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan komunikasi dua arah terhadap capaian kinerja dan anggaran yang dilaksanakan dengan memperhatikan kendala dan hambatan yang kemungkinan terjadi
3. Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk kekosongan Jabatan JF Perencana, sehingga kegiatan perencanaan perangkat daerah dapat dilaksanakan lebih baik dengan kompetensi yang memadai.
4. Optimalisasi pemanfaatan SDM, melalui pendampingan mandiri kepada SMD yang ada dalam penyusunan perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan program dan anggaran perangkat daerah.
5. Optimalisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi, melalui pembentukan tim evaluasi internal untuk memantau secara rutin capaian triwulan perangkat daerah.
6. Efisiensi Penggunaan Anggaran, melalui pencapaian kinerja tanpa harus menambah anggaran yang sudah disediakan.

7. Penguatan budaya kerja, melalui pelaporan yang secara rutin setiap triwulan tanpa harus melalui komando dari atasan dengan menanamkan integritas dan pelayanan publik dalam setiap kegiatan.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut bisa diatasi namun mengalami beberapa kesulitan sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi kurang optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran endala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi ini menjadi permasalahan bagi setiap perangkat daerah dimana tidak semua pegawai memiliki pemahaman yang mendalam tentang akuntabilitas kinerja. Selain itu juga, minimnya ketersediaan SMD perencanaan yang mahir dalam menyusun perencanaan hingga evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Budaya kerja yang belum optimal. Hal ini sering kali menjadi permasalahan sekunder dari perangkat daerah namun cukup terasa dimana sinkronisasi antarunit kerja sering kurang optimal, sehingga beberapa pekerjaan terkadang masih terdapat yang tidak sinkron satu sama lainnya.
3. Keterbatasan infrastuktur dan teknologi. Masih kurangnya pemahaman akan sebuah sistem yang terintegrasi melalui komitmen dari berbagai pemangku kepentingan dengan ditopang oleh anggaran yang kuat dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang terintegrasi melalui sistem.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penujang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.</b>	Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<p><b>Keberhasilan:</b> Sinergi yang kuat antar bidang dalam menyusun perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi kinerja dan anggaran perangkat daerah sehingga terwujudnya kinerja yang saling kolaboratif dan berkualitas hasil.</p> <p><b>Hambatan:</b> Masih terdapat keterlambatan sinkronisasi data dari masing-masing bidang dari rencana aksi hingga laporan evaluasi kinerja.</p>
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	<p><b>Keberhasilan:</b> peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan</p> <p><b>.Hambatan:</b> perangkat daerah belum sepenuhnya optimal dalam melakukan penatausahaan keuangan, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam proses pencairan</p>

				anggaran maupun pelaporan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Kompetensi sumber daya manusia yang memadai turut mempercepat proses administrasi, terutama dengan adanya pemahaman yang baik terhadap aturan kepegawaian. Selain itu, koordinasi yang efektif antar-bidang serta dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai memperkuat kelancaran pelaksanaan. Komitmen pimpinan perangkat daerah yang tinggi terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian menjadi faktor penentu yang memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Kecukupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya kecukupan layanan administrasi umum perangkat daerah didukung oleh regulasi yang jelas, kompetensi sumber daya manusia yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi yang meningkatkan efisiensi kerja. Koordinasi antar-unit berjalan baik, ditopang oleh sarana prasarana dan

				dukungan anggaran yang cukup, sehingga kebutuhan administrasi dapat terpenuhi secara menyeluruh dan mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemenuhan pengadaan barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Terlaksananya pemenuhan pengadaan barang milik daerah yang berfungsi dengan baik dapat dicapai berkat perencanaan kebutuhan yang tepat, dukungan anggaran yang memadai, serta proses pengadaan sesuai regulasi sehingga barang yang diperoleh dapat digunakan secara optimal. Namun, kegagalan dapat terjadi apabila perencanaan kurang akurat, anggaran terbatas, atau pengawasan kualitas dan pemeliharaan tidak berjalan konsisten sehingga barang yang dibeli tidak berfungsi maksimal.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya kecukupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Keberhasilan dan kegagalan didorong oleh perencanaan kebutuhan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta

				<p>koordinasi antar-unit kerja yang berjalan efektif sehingga layanan penunjang dapat tersedia sesuai standar dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun, kegagalan dapat muncul apabila perencanaan tidak akurat, anggaran terbatas, atau koordinasi kurang optimal, sehingga penyediaan jasa penunjang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan perangkat daerah.</p>
		<p>Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan DAerah</p>	<p>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik</p>	<p>Pelaksanaan pekerjaan berfungsi dengan baik menunjukkan adanya perencanaan yang tepat, dukungan anggaran yang memadai, serta komitmen perangkat daerah dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan fungsi barang. Namun, kegagalan dapat terjadi apabila pemeliharaan tidak konsisten, anggaran terbatas, atau pengawasan kurang optimal sehingga barang yang dimiliki tidak dapat digunakan</p>

				secara maksimal untuk mendukung tugas pemerintahan.
--	--	--	--	---

Sumber : Dinas Kominfo, 2025

Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang pencapaian kinerja sasaran telah berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap hasil yang dicapai. Seluruh kegiatan terbukti efektif dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Efektivitas tersebut tercermin dari capaian indikator yang mampu memenuhi target serta adanya konsistensi antara perencanaan dan implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dirancang dengan strategi yang tepat mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut, efektivitas program dan kegiatan juga terlihat dari kemampuan perangkat daerah dalam mengatasi berbagai tantangan teknis maupun non-teknis yang muncul selama pelaksanaan. Dukungan sumber daya manusia, pemanfaatan infrastruktur, serta koordinasi antarperangkat daerah berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan hambatan berarti. Kondisi ini memungkinkan target kinerja dapat dicapai secara maksimal, bahkan melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan dapat dikategorikan efektif dan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja di periode berikutnya.

Selanjutnya, Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** adalah sebesar Rp5.586.607.499,00 dengan realisasi sebesar Rp5.014.231.948,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran.

Tabel 3.6  
 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran  
 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	<b>PROGRAM:</b> PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.586.607.499	5.014.231.948	89,75
			<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.149.900	110.044.971	99,90
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.170.500	34.067.200	99,70
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.979.400	75.977.771	100,00
			<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.953.278.994	3.598.088.883	91,02
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.933.915.300	3.578.774.883	90,97
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.000.000	18.000.000	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.363.694	1.314.000	96,36
			<b>Kegiatan:</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	34.605.000	69,21

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	34.605.000	69,21
			<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.428.883	201.140.260	97,44
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.236.500	2.686.200	83,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.657.447	18.340.774	84,69
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.705.256	91.268.000	99,52
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.230.080	4.535.238	86,71
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.750.000	1.552.000	88,69
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.849.600	82.758.048	99,89
			<b>Kegiatan:</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.960.200	55.612.550	94,32
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.960.200	55.612.550	94,32

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.983.972	582.052.979	76,09
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.490.000	1.490.000	100,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.749.556	60.841.915	84,80
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	691.744.416	519.721.064	75,13
			<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.805.550	432.687.305	97,71
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.910.000	134.467.946	98,94
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	306.895.550	298.219.359	97,17
<b>Tingkat efisiensi (%)</b>						10,25

Sumber: LRA Dinas Kominfo, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 89,75%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai efisiensi sebesar 10,25%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran yang lebih rendah dari total alokasi menunjukkan bahwa target beberapa kinerja tidak sepenuhnya terserap dikarenakan kondisi cuaca yang lebih sering hujan membuat pengerjaan di salah satu kegiatan menjadi terkendala. Namun, penghematan ini merupakan pengendalian biaya yang ketat, serta pemanfaatan teknologi dan metode kerja yang lebih efektif.

2. Efisiensi SDM

Optimalisasi peran dan fungsi pegawai dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan kolaborasi lintas unit. Dengan jumlah SDM yang relatif terbatas, instansi mampu menghasilkan output maksimal, sehingga produktivitas meningkat tanpa menambah beban kerja berlebihan.

3. Efisiensi Waktu

Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan secara terstruktur sehingga target dapat dicapai tepat waktu. Efisiensi waktu ini berkontribusi pada percepatan pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang lebih responsif.

## 2. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Nilai Tata Kelola SPBE dan Nilai Layanan SPBE. Definisi operasional dari indikator Nilai Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terpadu dan Nilai Layanan SPBE adalah ukuran tingkat kualitas, keterpaduan, dan pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan.

Rata-rata capaian kinerja/Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE adalah sebesar 119,25% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.7.  
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE  
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	2.5	3.30	132%
		Nilai Layanan SPBE	4.0	4.26	106.5%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					119,25%

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, Indikator pertama Nilai Tata Kelola SPBE, menunjukkan capaian yang sangat signifikan dengan realisasi sebesar 132% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE pada Dinas Kominfotiksan tidak hanya terlaksana sesuai standar, tetapi juga melampaui ekspektasi yang direncanakan. Sementara itu, indikator kedua, yaitu Nilai Layanan SPBE, berhasil direalisasikan sebesar 106,5%, yang menandakan adanya peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik secara konsisten dan terukur. Kedua

capaian ini secara bersama-sama memperlihatkan komitmen kuat Dinas Kominfo dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta layanan publik yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, realisasi indikator di atas menjadi bukti nyata keberhasilan transformasi digital yang berkesinambungan, sekaligus memperkuat posisi Dinas Kominfo sebagai motor penggerak peningkatan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis elektronik di daerah.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola dan Layanan SPBE mengalami capaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja ini disebabkan oleh kuatnya komitmen bersama segenap perangkat daerah dalam menerapkan SPBE di Tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2023-2025:

Tabel 3.8.  
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola dan Layanan SPBE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	2.5	3.30	2.30	3,00
		Nilai Layanan SPBE	4.0	4.26	3.51	4,07

Sumber: Dinas Kominfo, 2025

Indikator kinerja pada sasaran strategis *Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE* menunjukkan dinamika capaian yang relatif stabil meskipun terdapat fluktuasi antar tahun. Nilai Tata Kelola SPBE pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,00 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,30 pada tahun 2024, dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 2,5. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan penguatan konsistensi dalam pengaturan, pengarahan, dan pengendalian tata kelola SPBE agar capaian dapat kembali meningkat sesuai target.

Sementara itu, Nilai Layanan SPBE menunjukkan capaian yang cukup baik, yakni 4,07 pada tahun 2023 dan 3,51 pada tahun 2024, dengan target tahun 2025 sebesar 4,0. Perkembangan ini menegaskan

bahwa kualitas layanan berbasis elektronik telah berjalan dengan baik, meskipun perlu dilakukan optimalisasi integrasi dan inovasi layanan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan komitmen Dinas Kominfotiksan dalam menjaga kesinambungan peningkatan tata kelola dan layanan SPBE, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat strategi pencapaian di tahun mendatang.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra 2021-2026, yang berarti telah tercapai 87.67% dari target tahun terakhir Renstra yaitu Tahun 2025 sebelum transisi pemerintahan. Dan menjadi awal bagi periode Renstra 2025-2029 Renstra pada tahun 2025. Namun mengalami perbedaan sasaran yang kemudian akan diukur pada Tahun berikutnya yaitu tahun 2026 Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.9.  
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	4.30	3.30	76.74%
		Nilai Layanan SPBE	4.32	4.26	98.61%
Rata-Rata Capaian					87.67%

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.10.  
Perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE

di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi/ Nasional
1	<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE</b>	Nilai Tata Kelola SPBE	3.30	<b>Indeks SPBE</b> Provinsi Jawa Timur: 4,79 / Rata-rata Nasional: 3,23
		Nilai Layanan SPBE	4.26	

Sumber: Dinas kominfotiksan, 2025 (diolah)

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu prioritas penting bagi Kabupaten Blitar. Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat transparansi, serta menghadirkan layanan publik yang lebih efektif dan efisien.

SPBE tidak hanya dipandang sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai strategi untuk membangun pemerintahan yang modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan, tata kelola, manajemen, serta layanan berbasis elektronik, Kabupaten Blitar terus bergerak menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Sipil Negara RI setiap tahun akan melakukan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi di pemerintah daerah dalam bentuk Laporan Hasil Pemantauan (LHP) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 yang sering disebut sebagai Indeks SPBE. Adapaun bobot penilaian berdasarkan domain yang dinilai sebanyak 4 domain dengan total keseluruhan 47 indikator penilaian. Berikut rincian bobot penilaian pada setiap domain penilaian yang ditetapkan oleh Tim Pemantau SPBE berdasarkan gambar berikut ini:

Gambar 3.1 Gambat Bobot Penilaian SPBE Tahun 2025

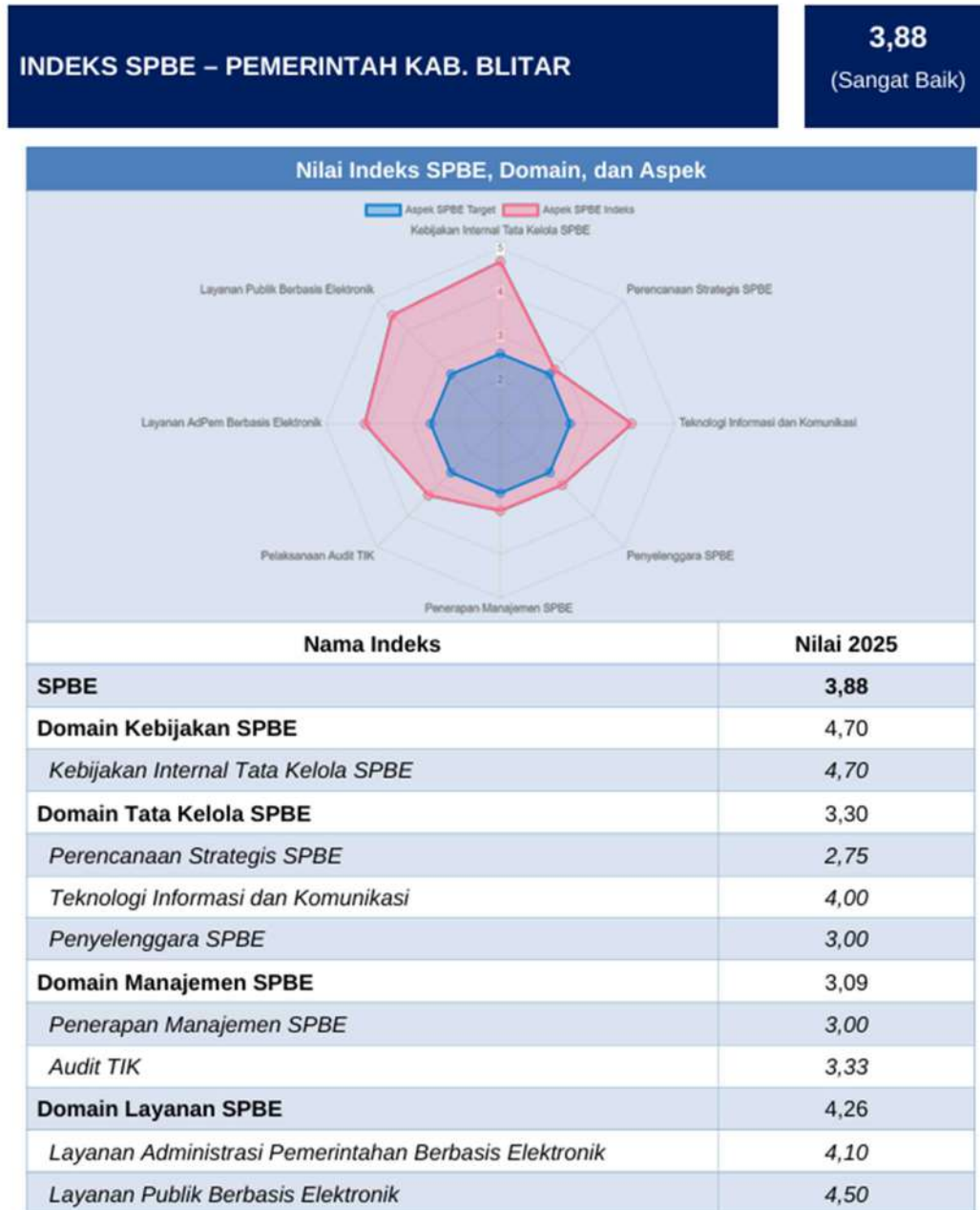
PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025																				
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – &lt; 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6	Cukup																		
5	< 1,8	Kurang																		
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

Sumber: KEMEN-PANRB RI, 2025

Dalam hal ini berdasar penilaian berdasarkan bobot penilaian pada setiap domain penilaian, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 3,88 dari nilai maksimal 5. Capaian ini menjadi sebuah kebanggaan bagi pemerintah daerah memperoleh nilai 3,88 pada Tahun 2025 yang merupakan predikat “sangat baik” berdasarkan penilaian KEMEN-PANRB RI. Setiap tahun indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Blitar terus menunjukkan peningkatan dan ini merupakan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel, efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian **3,88 (Sangat Baik)** mencerminkan keberhasilan Kabupaten Blitar dalam membangun ekosistem pemerintahan digital. Namun, aspek perencanaan strategis dan penguatan kelembagaan masih menjadi tantangan yang perlu ditingkatkan agar transformasi digital lebih berkelanjutan dan terintegrasi. Berikut gambar capaian dari LHP SPBE Tahun 2025 Kabupaten Blitar:

Gambar 3.2. LHP SPBE Tahun 2025



Sumber: KEMEN-PANRB RI, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Kominfo Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya bersamam dengan lintas sektor perangkat daerah dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Penguatan Tata Kelola SPBE

Dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan dan pemenuhan dokumen kebijakan SPBE, termasuk kebijakan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, serta standar layanan berbasis elektronik. Pada tahun 2025 telah dilakukan kegiatan Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Namun karena keterbatasan anggaran, kegiatan tersebut dipecah menjadi 2 yaitu tahap 1 di tahun 2025 dan tahap 2 di tahun 2026.

## 2. Peningkatan Integrasi Aplikasi dan Layanan Digital

Bidang Aptika mendorong integrasi aplikasi antar perangkat daerah guna mengurangi duplikasi sistem dan meningkatkan keterpaduan layanan administrasi pemerintahan. Integrasi ini mendukung efisiensi proses bisnis pemerintahan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu melalui pembangunan Aplikasi Portal Pelayanan Publik yang berfungsi sebagai media satu pintu untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi layanan, pengajuan permohonan layanan tertentu serta meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik berbasis SPBE di Kabupaten Blitar.

## 3. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK

Melalui fasilitasi bimbingan teknis, pendampingan, serta koordinasi teknis terkait pengelolaan SPBE, dilakukan peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur perangkat daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Diantaranya melalui kegiatan :

- a) workshop penguatan jaringan pada perangkat Daerah di Kabupaten Blitar, bimbingan teknis penyusunan SIA SPBE v2, Pelatihan Vibe Coding or Not?,
- b) Bimbingan teknis pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk UMKM di desa Sumberarum, Bimbingan teknis pemanfaatan teknologi di era digital bagi pemilik umkm di Kelurahan Kauman.

## 4. Optimalisasi Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik

Upaya dilakukan dengan mendorong pemanfaatan aplikasi umum SPBE serta penguatan layanan digital internal pemerintahan, sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut cukup sulit diatasi diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi menjadi kurang optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE adalah sebagai berikut.

1. Sebagian aplikasi yang dibangun oleh perangkat daerah tidak ada dalam perencanaan (peta rencana) dan arsitektur SPBE, karena inovasi aplikasi tersebut merupakan proyek perubahan pendidikan dan pelatihan. Selain itu adanya perubahan aplikasi yang disebabkan perubahan regulasi dari pemerintah pusat.
2. Sistem informasi perangkat daerah melalui website maupun sosial media perangkat daerah belum seluruhnya optimal, sehingga informasi program kegiatan pada perangkat daerah tidak dapat diakses oleh publik.
3. Pada kegiatan bimbingan teknis, peserta yang memperoleh disposisi belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan materi dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11.

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran  
Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah	<p><b>Keberhasilan:</b> Tingkat transparansi informasi yang semakin baik dengan memperhatikan kualitas konten daerah. Ditopang juga dengan konsistensi dan SDM yang memadai serta teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan konten informasi. Selain itu juga partisipasi dan responsivitas pemerintah dan masyarakat yang aktif.</p> <p><b>Kegagalan:</b> Ketidaktransparansi informasi yang diberikan menjadi stigma negatif bagi konsumen informasi. Terkadang konten yang kurang menarik dan sulit dipahami karena adanya inkonsistensi</p>

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
				informasi serta tidak ditopang dengan teknologi yang memadai. Selain itu partisipasi yang pasif membuat informasi yang tersampaikan menjadi tidak menarik.
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan dan pelaksanaan kegiatan dengan didukung oleh teknisi yang tepat dan ahli membuat infrastruktur teknologi serta layanan digital dapat terpenuhi dan sebaliknya.
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan SPBE menjadi dasar peningkatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya dalam pemenuhan indikator kebijakan dan tata kelola SPBE

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Baiknya data dimulai dari perencanaan data yang dilaksanakan sesuai prosedur dengan memperhatikan kompetensi SDM Statistisi atau berkompentensi memahami statistik sektoral dan ditopang oleh kebijakan dan regulai sehingga dapat mewujudkan data informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.
	<b>PROGRAM:</b> PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Indeks KAMI	Keamanan merupakan tonggak terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam dunia teknologi informasi. Dengan di topang oleh kebijakan yang kuat dan ketersediaan SDM yang ahli di bidangnya menjadikan infrastruktur digital menjadi damai tanpa ada intervensi dari pihak-pihak yang

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
				berbuat kejahatan. Apabila ini tidak terpenuhi salah satunya, makan ketimpangan mungkin terjadi dan kegagalan berpeluang lebih besar terhadap keamanan informasi

Sumber : Diskominfo, 2025

Selain untuk mencapai nilai Indeks SPBE, Dinas Kominfo juga melaksanakan kinerja sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi melalui survey kepuasan masyarakat dengan target 85,50%. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 khususnya terhadap pelayanan akses informasi publik adalah 85,85%. Pelayanan akses informasi publik tersebut terdiri dari pelayanan informasi publik (sosmed, non sosmed, web PPID dan *front desk*) dan pelayanan Radio Persada. Hasil SKM meningkat dari tahun lalu yang sebesar 0,32%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pengelolaan informasi dan akses informasi di Kabupaten Blitar semakin meningkat.

Dalam meningkatkan pengelolaan informasi dan akses informasi telah dilakukan langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sebagai berikut:

- a) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi. Mengimplementasikan teknologi terbaru seperti *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, dan *Artificial Intelligence (AI)* untuk mengelola dan menyebarkan informasi secara efisien;

- b) Peningkatan Kualitas Konten Informasi. Konten yang akurat dan terpercaya dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan terverifikasi. Konten yang ramah pengguna dengan menyediakan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti infografik, video pendek, dan artikel ringkas;
- c) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan SDM dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik;
- d) Pengembangan *Platform* Komunikasi. Mengembangkan *platform* digital dengan situs web resmi, media sosial untuk menyebarkan informasi publik;
- e) Kolaborasi dengan *Stakeholder*. Kerja sama antar instansi pemerintah untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan upaya diseminasi informasi publik; dan
- f) Kemitraan dengan Media. Bekerja sama dengan media massa untuk memastikan bahwa informasi publik dapat mencapai audiens yang lebih luas.

Melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupaya untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi terkait program dan kegiatan maupun capaian hasil-hasil pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah (contoh tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang telah didiseminasikan sesuai strategi komunikasi melalui sosial media (*Instagram, Facebook, Website* dan *Youtube*), dan media *partner* meliputi media *online*, media cetak, radio dan televisi. Dalam tahun 2025 publikasi yang dilakukan adalah melalui media sosial adalah sebanyak 2.795

publikasi. Dari keseluruhan jumlah tersebut yang memuat isu strategis Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebanyak 2.795 konten. Artinya dalam satu tahun 100% publikasi humas Pemerintah Kabupaten Blitar memuat isu strategis Pemerintah Kabupaten Blitar;

- b) Kegiatan PPID dan E-Lapor yang dipenuhi dan difasilitasi pada tahun 2025 berjumlah 15 dengan rincian 15 laporan telah ditindaklanjuti sampai selesai.
- c) Layanan informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 telah tersedia pada portal [ppid.blitarkab.go.id](http://ppid.blitarkab.go.id), [transparansi.blitarkab.go.id](http://transparansi.blitarkab.go.id), dan ringkasan [apbd.blitarkab.go.id](http://apbd.blitarkab.go.id); dan
- d) Mitra strategis pemerintah daerah (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah terdiri dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Relawan TIK, dan *Media Partner*.

## 2. **Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus**

Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah. Target yang dilayani untuk pengembangan aplikasi seluruh PD (52 Unit/ PD). Pada tahun 2025 ini ada 3 aplikasi yang difasilitasi untuk pengembangan aplikasi (E-Reklame, E-LKPJ, Pengawasan Kearsipan). Sementara untuk pembangunan aplikasi sejumlah 1 aplikasi yaitu aplikasi Portal Pelayanan Publik. Permasalahan yang dihadapi yaitu Kurangnya dokumentasi dan pengendalian mutu selama pengembangan aplikasi, sehingga perlu meningkatkan pengawasan mutu dan audit internal terhadap aplikasi yang dikembangkan;

### 3. Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Pusat Data yang dikelola yaitu sebanyak 2 (Pusat Data Kabupaten Blitar dan Pusat Data Nasional). Pusat Data Kabupaten rentan terhadap *downtime* saat terdapat masalah pada perangkat. Untuk aplikasi yang bersifat *critical* dilakukan migrasi ke Pusat Data Nasional yang mana sudah pada tier 4 (*fault tolerant site infrastructure*).

### 4. Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah

Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah pada dengan ukuran kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 100 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah memanfaatkan data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Meskipun demikian, kedepan masih diperlukan penguatan pemanfaatan portal data daerah sebagai sarana terintegrasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan diseminasi data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program tersebut diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan jumlah Perangkat Daerah yang terlibat sebanyak 52 PD. Berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, RSUD Wlingi dan RSUD Srengat berada di bawah naungan Dinas Kesehatan, namun dalam praktik pemanfaatan data statistik, RSUD Ngudi Waluyo dan RSUD Srengat telah mengembangkan dan mengelola portal data sektorial secara mandiri. Kegiatan ini selanjutnya didukung oleh 5 (lima) subkegiatan sebagai bagian dari

upaya penguatan tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu :

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan mendukung implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Blitar, telah dilaksanakan Diklat Statistik Sektoral bekerja sama dengan BPS Kabupaten Blitar pada tanggal 27–28 November 2025 yang diikuti oleh 100 peserta dari 63 Perangkat Daerah termasuk kecamatan secara *online*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami kebijakan Satu Data Indonesia, penerapan standar dan metadata statistik, serta proses bisnis statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui diklat ini, peserta dibekali pemahaman mengenai tata kelola data pemerintah, peran kelembagaan Satu Data Indonesia, serta tahapan kegiatan statistik berdasarkan kerangka *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM), sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas, konsistensi, dan pemanfaatan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Peserta yang memenuhi *passing grade*, mendapatkan sertifikat peningkatan kompetensi selama 9 Jam Pelajaran dari Pusdiklat BPS RI.

b. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

Pada Sub Kegiatan ini, indikator kinerja persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan ditetapkan dengan target sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen, sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah memanfaatkan data

statistik sebagai dasar dalam mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan serta perumusan kebijakan. Namun demikian, kualitas pemanfaatan data statistik tersebut masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam hal penggunaan data yang terstandar, terdokumentasi dengan metadata yang lengkap, serta diselaraskan dengan tahapan Satu Data Indonesia, agar pemanfaatan data tidak hanya bersifat administratif tetapi juga analitis dan berkelanjutan.

c. **Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu ditetapkan dengan target 60 persen. Realisasi capaian pada tahun pelaksanaan mencapai 71,43 persen, yang diperoleh dari 25 kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu dari total 35 kegiatan. Dengan demikian, capaian indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Kegiatan statistik sektoral yang belum dirilis tepat waktu diakibatkan oleh jadwal penyajian yang dilaksanakan pada tahun 2026. Oleh karena itu, akan dilakukan pendampingan dan koordinasi teknis terhadap Perangkat Daerah terkait guna mendorong percepatan penyelesaian dan rilis kegiatan statistik sektoral yang belum terlaksana, sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan memenuhi standar kualitas statistik sektoral.

d. **Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia**

Pada kegiatan ini dihasilkan beberapa kajian baik terkait penghitungan indikator kinerja daerah ataupun analisis dan diseminasi lain diantaranya :

### 1. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

Nilai ICOR Kabupaten Blitar tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana capaian tahun 2024 sebesar 6,23 meningkat dari tahun sebelumnya artinya untuk menghasilkan tambahan 1 miliar output diperlukan investasi sebesar Rp. 6,23 miliar. Sementara analisis ICOR secara sektoral dengan menggunakan metode standar (Time Lag 0), Time Lag 1 hingga 3 menunjukkan bahwa dua sektor yang masuk kategori efisien dan sangat efisien yaitu : 1) Transportasi dan Pergudangan; dan 2) Jasa lainnya. Sektor tersebut jika dilakukan investasi tidak hanya efisien meningkatkan output pada tahun yang sama melainkan efisien meningkatkan output beberapa tahun berikutnya. Berikut tautan hasil Kajian ICOR :  
<https://data.blitarkab.go.id/publikasi/incremental-capital-output-ratio-icor-kabupaten-blitar-tahun-2025-yd0q96zj>

Gambar 3.3. Dokumen Penyusunan ICOR Kabupaten Blitar Tahun 2025



Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

## 2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Blitar pada 2025 mendapat skor 75,34. Perolehan IKLI dari 2021 hingga tahun 2025 ini menunjukkan kenaikan sebesar 4,96 poin. Terdapat enam indikator yang mendapatkan poin plus dan satu indikator minus pada survei kepuasan layanan infrastruktur 2025. Enam indikator yang mendapatkan poin plus adalah jembatan (1,7), transportasi darat (0,18), irigasi pertanian (0,31), air bersih (0,55), perumahan (0,08), dan telekomunikasi (0,4). Sedangkan jalan raya tercatat -0.36 jika dibandingkan dengan perolehan IKLI pada tahun sebelumnya. Berikut tautan Hasil Kajian IKLI <https://data.blitarkab.go.id/publikasi/indeks-kepuasan-layanan-infrastruktur-ikli-kabupaten-blitar-tahun-2025-v70r6v05>

Gambar 3.4.. Dokumen Laporan Akhir IKLI Kabupaten Blitar Tahun 2025



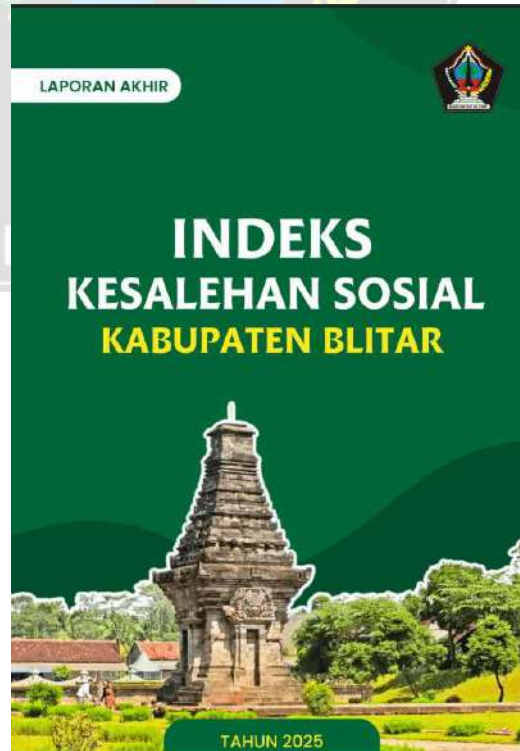
Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

### 3. Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

Nilai IKS Kabupaten Blitar tahun 2025 tercatat sebesar 84,98, masuk dalam kategori sangat tinggi, dan mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen dibandingkan tahun 2024. Dimensi dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan IKS tersebut adalah Dimensi Ketertiban Umum, yang menyumbang sebesar 46,17. Disusul oleh Dimensi Toleransi dengan kontribusi sebesar 22,54. Kemudian, Dimensi Kerjasama memberikan kontribusi sebesar 17,17 dan terakhir, Dimensi Solidaritas Sosial dengan kontribusi sebesar 14,12. Hasil Kajian IKS Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat dilihat dalam tautan

<https://data.blitarkab.go.id/publikasi/indeks-kesalehan-sosial-iks-kabupaten-blitar-tahun-2025-o6zpoo0r>

Gambar 3.5. Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025



Sumber: Dinas Kominfo, 2025

Dalam IKS 2025 juga dihitung IKS per Kecamatan yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12.  
Indeks Kesalahan Sosial Menurut Kecamatan

Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Indeks Kesalahan Sosial	Kategori
35.05.05	Bakung	78,38	Tinggi
35.05.08	Wonotirto	77,38	Tinggi
35.05.13	Panggungrejo	84,64	Sangat Tinggi
35.05.20	Wates	87,54	Sangat Tinggi
35.05.16	Binangun	90,38	Sangat Tinggi
35.05.12	Sutojayan	87,70	Sangat Tinggi
35.05.04	Kademangan	78,14	Tinggi
35.05.10	Kanigoro	85,33	Sangat Tinggi
35.05.14	Talun	89,00	Sangat Tinggi
35.05.22	Selopuro	90,64	Sangat Tinggi
35.05.19	Kesamben	80,04	Sangat Tinggi
35.05.21	Selorejo	80,56	Sangat Tinggi
35.05.18	Doko	78,67	Tinggi
35.05.17	Wlingi	73,83	Tinggi
35.05.15	Gandusari	73,53	Tinggi
35.05.11	Garum	78,16	Tinggi
35.05.09	Nglegok	89,42	Sangat Tinggi
35.05.07	Sanankulon	84,17	Sangat Tinggi
35.05.06	Ponggok	89,07	Sangat Tinggi
35.05.03	Srengat	96,44	Sangat Tinggi
35.05.01	Wonodadi	95,16	Sangat Tinggi
35.05.02	Udanawu	96,63	Sangat Tinggi

Sumber: Publikasi IKS, 2025

4. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan menghasilkan nilai IKM tahun 2025 sebesar 84,15 dan berada pada kategori Baik. Hasil kajian IKM Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat dalam tautan

<https://data.blitarkab.go.id/publikasi/survei-kepuasan-masyarakat-dinas-komunikasi-informatika-statistik-dan-persandian-kabupaten-blitar-tahun-2025-qdzj5onw>

Gambar 3.6. Survei IKM Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025



Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Angka IKM menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022

hingga tahun 2025. Terdapat 10 layanan dalam IKM tahun 2025 yang terdiri dari :

- a) Radio Persada sebesar 87,86 masuk kedalam kategori A atau Sangat Baik.
- b) Call Center 112 sebesar 86,84 masuk kedalam kategori B atau Baik.
- c) Subdomain sebesar 82,53 masuk kedalam kategori B atau Baik.
- d) Portal Satu Data sebesar 85,34 masuk kedalam kategori B atau Baik.
- e) Email.gov sebesar 84,38 masuk kedalam kategori B atau Baik.
- f) Informasi Publik sebesar 83,85 masuk kedalam kategori B atau Baik.
- g) Pusat Data sebesar 83,91 masuk kedalam kategori B atau Baik.
- h) Tanda Tangan Elektronik sebesar 83,26 masuk kedalam kategori B atau Baik.
- i) SP4N Laporan! sebesar 79,31 masuk kedalam kategori B atau Baik.
- j) Jaringan Internet sebesar 82,51 masuk kedalam kategori B atau Baik.

#### 5. Nilai Tukar Petani (NTP)

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Blitar berperan strategis dalam mendorong ekonomi daerah dan kesejahteraan petani yang dianalisis melalui NTP pada lima subsektor utama. Hasil analisis periode Januari 2024–Mei2025 menunjukkan dinamika NTP yang bervariasi antar subsektor, dengan rata-rata NTP Kabupaten Blitar (Januari–Desember) 2024 tercatat sebesar **99,61**. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi daya beli petani

masih berada sedikit di bawah titik impas dan mencerminkan adanya tekanan terhadap pendapatan petani sepanjang tahun tersebut. Memasuki awal 2025, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan, dengan NTP gabungan yang meningkat dan mencapai puncak sebesar 114,25 pada Maret. Hasil kajian NPT Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat dilihat dalam tautan <https://data.blitarkab.go.id/publikasi/laporan-akhir-kajian-nilai-tukar-petani-ntp-kabupaten-blitar-tahun-2025-ke087pn9> .

Gambar 3.7. Kajian NTP Kabupaten Blitar Tahun 2025



Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

**Pada tahun 2025**, khususnya periode (Januari–Mei), NTP Kabupaten Blitar memiliki rata-rata sebesar **106,24**, yang mengindikasikan bahwa secara umum pendapatan petani sudah berada di atas tingkat pengeluarannya meskipun masih menghadapi tekanan musiman dan fluktuasi harga. Pergerakan NTP terutama dipengaruhi oleh fluktuasi Indeks

Harga yang Diterima Petani (It), sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) relatif stabil meski tertekan kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBPPBM). Secara sektoral, subsektor perkebunan rakyat merupakan yang paling stabil dan tangguh, tanaman pangan dan hortikultura paling fluktuatif akibat ketergantungan pada harga musiman, peternakan relatif moderat, dan perikanan mulai menunjukkan pemulihan meski perikanan tangkap sempat mengalami penurunan di pertengahan tahun. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang lebih adaptif, berorientasi pada stabilitas pendapatan petani, dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Blitar.

e. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu jumlah statistik sektoral yang mengajukan permintaan rekomendasi kepada Pembina Data Statistik ditetapkan dengan target 30 dokumen kegiatan. Pada tahun pelaksanaan, terdapat 57 kegiatan statistik sektoral yang diajukan untuk memperoleh rekomendasi, dan 35 kegiatan atau 61,4 persen telah memperoleh rekomendasi layak dari BPS. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengajuan rekomendasi telah melampaui target. Sementara itu, 22 kegiatan statistik yang tidak mendapatkan rekomendasi dikarenakan beberapa hal diantaranya duplikasi pengajuan rekomendasi, serta keterlambatan pengajuan rekomendasi pasca kegiatan statistik telah dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya pemahaman Perangkat Daerah mengenai kewajiban permintaan rekomendasi BPS, belum dijadikannya rekomendasi sebagai persyaratan wajib dalam perencanaan kegiatan statistik sektoral,

serta belum tersedianya regulasi daerah yang mengikat. Sebagai tindak lanjut, dilakukan sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis secara berkala bersama BPS serta penyusunan dan penetapan regulasi daerah yang mewajibkan seluruh kegiatan statistik sektoral memperoleh rekomendasi dari Pembina Data Statistik.

## **5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada indikator kinerja Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah mendapatkan hasil yang baik yaitu dengan nilai realisasi 85,04% melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 55%. Tingkat kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ini menggunakan formulasi dari hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (IKAMI) versi 5 yaitu alat ukur yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menilai tingkat kesiapan penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) di instansi pemerintah, berdasarkan standar SNI ISO/IEC 27001.

Pelaksanaan program tersebut diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI) dan output kegiatan 2 dokumen yaitu

1. Dokumen Sertifikasi ISO 27001 : 2022 ; dan
2. Dokumen Pelaksanaan Urusan Persandian.

Selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh 1 subkegiatan yaitu Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indicator Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dan menghasilkan output yaitu 1 Laporan Evaluasi CSIRT/TTIS Kabupaten Blitar 2025.

Pada tahun 2025, urusan persandian selain mengampu kegiatan pengamanan berita sandi juga melaksanakan pengamanan jaringan internet dan data center di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pengamanan jaringan dan data center ini diwujudkan dalam bentuk optimalisasi penerapan Firewall yang mengatur lalu lintas keluar masuk jaringan internet dan server. Selain itu pengamanan terhadap website dan aplikasi sudah mulai digalakkan secara bertahap dengan penerapan SSL yang berfungsi melakukan enkripsi informasi sensitif pada website dan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Seluruh kegiatan ini tertuang dalam dokumen dan laporan yang ada sehingga secara holistic dalam satu sub kegiatan tersebut menghasilkan 3 dokumen yang sangat berkaitan dan saling mendukung tercapainya indicator pada program kegiatan.

Adapun penjelasannya dijabarkan dalam dalam beberapa poin berikut :

a. Dokumen Sertifikasi ISO 27001 : 2022

Standar Sistem Manajemen merupakan produk yang dikeluarkan oleh ISO untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Sistem manajemen keamanan informasi ISO/IEC 27001 merupakan standar internasional yang menyediakan kerangka kerja penerapan manajemen risiko terkait keamanan informasi pada sebuah organisasi. Keamanan informasi dalam ISO/IEC 27001 mencakup kebijakan manajerial secara umum dan berbagai petunjuk teknis serta operasional yang lengkap dan mendalam. Dalam prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2022 berfokus pada keamanan informasi keamanan siber, dan perlindungan data pribadi. Implementasi ISO/IEC 27001:2022 memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, diantaranya :

- Pemenuhan persyaratan atau regulasi
- Meningkatkan reputasi

- Efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas

Dalam subkegiatan tersebut terdapat kegiatan Pendampingan Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen keamanan informasi dan kualitas pelayanan publik.

Maksud Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Blitar, dalam rangka:

- a. Meningkatkan kualitas Manajemen Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Blitar
- b. Meningkatkan kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Blitar
- c. Mempersiapkan sarana/instrumen untuk kebutuhan keamanan informasi yang terstandarisasi ISO/IEC 27001:2022
- d. Terselenggaranya pelatihan pemahaman dan dokumentasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO/IEC 27001:2022

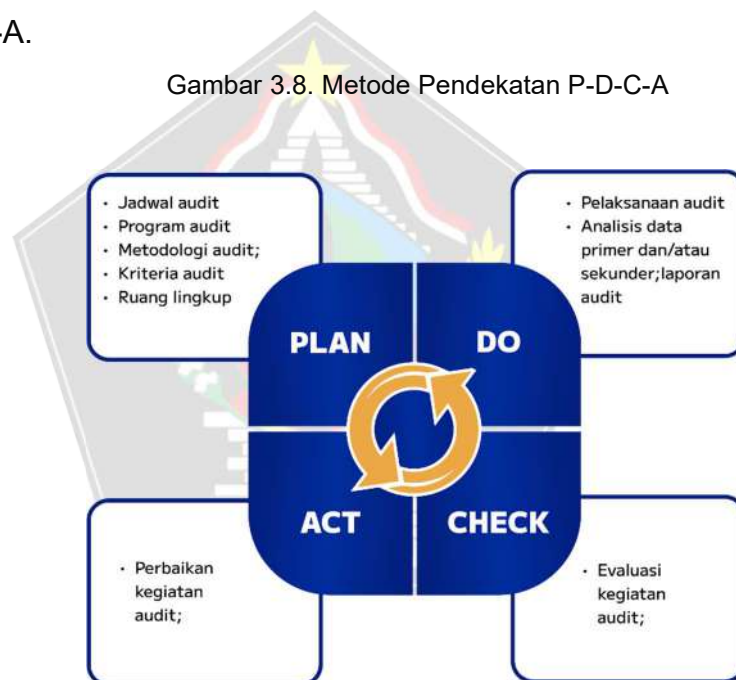
Sementara itu, tujuan dari proses pendampingan penyusunan tata kelola keamanan informasi adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia sesuai peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku serta memiliki kompetensi di bidangnya
- b. Menghasilkan pelayanan / jasa yang sesuai dengan standar keamanan informasi nasional dan internasional
- c. Mematuhi peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku

Secara umum sasaran dari penyusunan tata kelola keamanan informasi adalah peningkatan kualitas keamanan informasi secara internal dan eksternal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Blitar.

a. Metodologi yang digunakan dalam implementasi ISO/IEC 27001:2022 adalah pendekatan berdasarkan P-D-C-A. Secara garis besar, standarisasi menggunakan ISO berdasarkan pada metode ini, sehingga asesmen dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian proses Sistem Manajemen dengan penerapan P-D-C-A. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai metode P-D-C-A.

Gambar 3.8. Metode Pendekatan P-D-C-A



Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Metode P-D-C-A merupakan siklus metode audit yang diterapkan dalam mengimplementasi dan menyelaraskan sistem manajemen organisasi dengan standar ISO/IEC 27001:2022. Tahapan siklus audit P-D-C-A dapat dijelaskan pada bagian berikut:

**Perencanaan** – Rencana kegiatan yang disusun untuk memenuhi isu eksternal/ internal organisasi dan mampu

mengakomodasi harapan dari para pemangku kepentingan. Kedua aspek tersebut harus mampu tertuang dalam kriteria dan ruang lingkup audit. Dalam asesmen ini, akan dilihat apakah perencanaan dalam sistem manajemen keamanan informasi milik organisasi sudah sesuai dengan standar atau belum.

**Pelaksanaan** – Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan seluruh kriteria yang ditentukan pada saat perencanaan. Dalam asesmen ini, akan dilihat apakah pelaksanaan implementasi telah sesuai dengan perencanaan atau belum. Adapun apabila perencanaan masih belum sesuai dengan standar, maka pelaksanaan akan dibandingkan dengan standar atau *best practice* dalam sistem manajemen keamanan informasi.

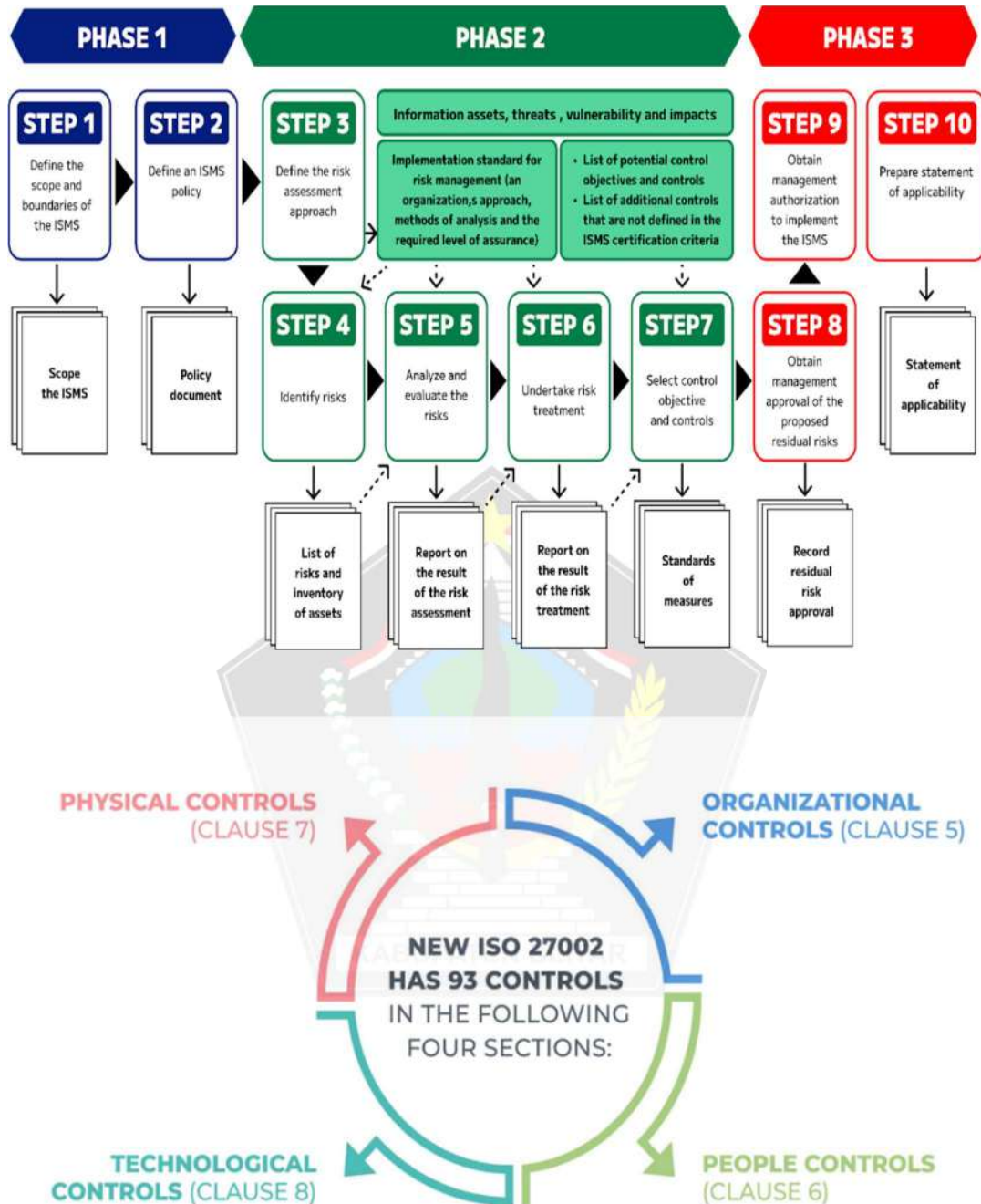
**Evaluasi** – Pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian atas rencana, efektivitas dan pemenuhan target dan sasaran audit. Kegiatan ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh dalam proses asesmen, namun dari hasil yang ditemukan dapat diperkirakan seberapa siap kesiapan dari untuk mengimplementasikan ISO/IEC 27001:2022.

**Perbaikan** – Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan asesmen akan menjadi masukan dalam rencana perbaikan atau peningkatan (*improvement*)

### **Kerangka Kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi**

Kerangka kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang digunakan adalah ISO/IEC 27001:2022, gambar di bawah adalah *framework* ISO/IEC 27001:2022.

Gambar 3.9. Kerangka Sistem Manajemen Keamanan Informasi



Sumber: Dinas Kominfo, 2025

b. Dokumen Pelaksanaan Urusan Persandian.

Merupakan dokumen wajib yang setiap tahun dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Bupati Blitar dan juga dikirimkan ke

Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Lembaga setingkat kementerian yang menaungi urusan Persandian. Dalam dokumen itu tercantum perkembangan dan pelaksanaan urusan di pemerintah daerah mulai dari Ringkasan Eksekutif Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Program Kerja Urusan Persandian Tahun 2025, Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan serta Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian masalah. Selanjutnya juga bagaimana program Kerja Tahun yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

c. Laporan Evaluasi Penyelenggaraan CSIRT / TTIS Kabupaten Blitar.

Pemerintah Kabupaten Blitar menyelenggarakan layanan TTIS terhadap seluruh konstituen sesuai dengan RFC-2350 yang meliputi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar guna terwujudnya pengelolaan keamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan prinsip keamanan informasi yaitu untuk menjamin ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*), dan kerahasiaan (*confidentiality*) aset informasi Pemerintah Kabupaten Blitar, memberikan peringatan terkait keamanan informasi (*alerts and warnings*), melakukan koordinasi penanganan insiden siber (*incident handling coordination*), melakukan koordinasi penanganan kerawanan sistem informasi (*vulnerability handling coordination*), dan memberikan edukasi dan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.. Adapun dalam penyelenggaraannya, TTIS berkolaborasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah melalui agen siber yang tergabung dalam Tim TTIS. TTIS membuka layanan portal aduan siber dan menghimbau baik kepada pegawai internal maupun masyarakat luar untuk dapat melaporkan insiden siber jika terdapat gangguan atau tidak

berjalannya sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Blitar ke alamat <https://titis.blitarkab.go.id>.

Selama dalam penyelenggaraan TTIS dalam (1 Januari 2025 sampai Desember 2025), Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan evaluasi penyelenggaraan TTIS dan kematangan penanganan insiden siber dengan hasil sebagai berikut:

Fungsi Utama yang diselenggarakan berupa :

1. Pemberian peringatan terkait keamanan siber

Fungsi ini berupa pemberian peringatan terkait informasi anomali atau ancaman siber kepada seluruh konstituen.

TiTIS-BlitarKab telah rutin memberikan peringatan apabila informasi anomali atau ancaman siber kepada keseluruhan OPD melalui sistem monitoring Wazuh yang sudah terpasang pada semua aset milik OPD. Peringatan tersebut diberikan dalam bentuk laporan anomali atau ancaman siber dan mewajibkan bagi pemilik aset untuk memberikan feedback berupa tindak lanjut atas peringatan terkait informasi anomali atau ancaman siber yang telah diberikan melalui jalur komunikasi srikandi dan pesan singkat melalui whatsapp.

2. Perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber

Fungsi ini berupa perumusan panduan teknis penanganan insiden siber.

TiTIS-BlitarKab rutin melakukan analisa terhadap berbagai ancaman siber yang terjadi. Beragam ancaman siber itu memiliki pola-pola yang beragam, maka TiTIS-BlitarKab menyediakan panduan ancaman siber yang telah disahkan baku oleh BSSN dan disebarluaskan melalui website <https://titis.blitarkab.go.id/guidance>

3. Pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;

TiTiS-BlitarKab telah menerima aduan insiden siber di tahun 2025. Aduan siber ini dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

a. Aduan insiden siber

Aduan insiden siber sebanyak 11 dengan keberhasilan penanganan insiden siber sebanyak 11 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13.  
Penanganan Insiden Siber di Pemerintah Kabupaten Blitar selama Tahun 2025

No	Alamat url yang ternotifikasi/dilaporkan	Tanggal Kejadian	Sumber Laporan	Status Penanganan	Lama Waktu Penanganan	SLA	Temuan Hasil Investigasi/ Penyelidikan	Keterangan
1.	<a href="https://sikanda.blitarkab.go.id/pages/earth">https://sikanda.blitarkab.go.id/pages/earth</a>	30 Januari 2025	Dorking	Tertangan	1 hari	1x24 jam	Terindikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut : a. Webshell b. Penambahan file /pages/earth/index.php c. Penambahan file /pages/earth/sitemap.xml	Eskalasi ke BKPSDM melalui surat pemberitahuan insiden siber, pencatatan insiden, dan removal index pada google search console
2.	<a href="https://sikanda.blitarkab.go.id/pages/earth">https://sikanda.blitarkab.go.id/pages/earth</a>	02 Februari 2025	Dorking	Tertangan	1 hari	1x24 jam	Penyerang kembali masuk dengan celah yang sama di lokasi folder yang sama	pemberitahuan insiden siber, pencatatan insiden, dan removal

No	Alamat url yang ternotifikasi/dilaporkan	Tanggal Kejadian	Sumber Laporan	Status Penanganan	Lama Waktu Penanganan	SLA	Temuan Hasil Investigasi/ Penyelidikan	Keterangan
								index pada google search console
3.	<a href="https://sikanda.blitarkab.go.id/pages/earth">https://sikanda.blitarkab.go.id/pages/earth</a>	03 Februari 2025	Dorking	Tertangani	1 hari	1x24 jam	Penyerang kembali masuk dengan celah yang sama di lokasi folder yang sama	pemberitahuan insiden siber, pencatatan insiden, dan removal index pada google search console
4.	Data pribadi perikanan breach	05 Maret 2025	Threat Inteligent report dari socradar.io	Tertangani	1 hari	1x24jam	Upaya Penjualan kebocoran data pribadi peternak ikan dari aplikasi survey perikanan milik dinas perikanan dan peternakan	Kontenerisasi VM, perbaikan aplikasi, oleh Hasan.
5.	Massive web defacement: > <a href="https://tapes.blitarkab.go.id">https://tapes.blitarkab.go.id</a> > <a href="https://bakasbangpol.blitarkab.go.id">https://bakasbangpol.blitarkab.go.id</a> > <a href="https://dkpp">https://dkpp</a>	20 Maret 2025	<a href="https://zoxec.com/search?q=.go.id">https://zoxec.com/search?q=.go.id</a>	Tertangani	1 hari	1x24 jam	Password CPANEL pada akun-akun web tersebut lemah	Suspense akun cpanel, dilakukan penggantian password, dan pembersihan folder pada web

No	Alamat url yang ternotifikasi/dilaporkan	Tanggal Kejadian	Sumber Laporan	Status Penanganan	Lama Waktu Penanganan	SLA	Temuan Hasil Investigasi/ Penyelidikan	Keterangan
	<a href="http://blitarkab.go.id">.blitarkab.go.id</a> <a href="https://dispkerindag.blitarkab.go.id">&gt;https://dispkerindag.blitarkab.go.id</a> <a href="https://umum.blitarkab.go.id">&gt;https://umum.blitarkab.go.id</a> <a href="https://organisasi.blitarkab.go.id">&gt;https://organisasi.blitarkab.go.id</a> <a href="https://kecamatanlegok.blitarkab.go.id">&gt;https://kecamatanlegok.blitarkab.go.id</a>							terinfeksi dan penghapusan index pada google search console
6.	Web defacement judi online pada subdomain disbudpar.blitarkab.go.id	22 Maret 2025	Dorking	Tertangani	1 hari	1x24 jam	Web defacement judi online pada website disbudpar URL <ol style="list-style-type: none"> <li><a href="https://disbudpar.blitarkab.go.id/data/">https://disbudpar.blitarkab.go.id/data/</a></li> <li><a href="https://disbudpar.blitarkab.go.id/bidang/">https://disbudpar.blitarkab.go.id/bidang/</a></li> <li><a href="https://disbudpar.blitarkab.go.id/news/">https://disbudpar.blitarkab.go.id/news/</a></li> <li><a href="https://disbudpar.blitarkab.go.id/">https://disbudpar.blitarkab.go.id/</a></li> </ol>	Suspense akun cpanel, dilakukan penggantian password, dan pembersihan folder pada web terinfeksi dan penghapusan index pada google search console

No	Alamat url yang ternotifikasi/dilaporkan	Tanggal Kejadian	Sumber Laporan	Status Penanganan	Lama Waktu Penanganan	SLA	Temuan Hasil Investigasi/ Penyelidikan	Keterangan
							<a href="http://par.blitarkab.go.id/base/">par.blitarkab.go.id/base/</a> 5. <a href="https://disbudpar.blitarkab.go.id/aspek/">https://disbudpar.blitarkab.go.id/aspek/</a>  Password CPANEL pada akun-akun web tersebut lemah	
7.	Web defacement judi online pada aplikasi SIP milik dinas pertanian dengan VM etani <a href="https://sip.blitarkab.go.id/">https://sip.blitarkab.go.id/</a> ...	13 Juni 2025	Dorking & google search console via gmail	Tertangani	1 hari	1x24 Jam	Peretasan aplikasi SIP pada VM etani milik Dinas Pertanian	Kontenerisasi VM etani
8.	Web defacement pada website <a href="https://dishub.blitarkab.go.id/">https://dishub.blitarkab.go.id/</a>	28 Juni 2025	Dorking & notifikasi google search console via gmail	Tertangani	1 hari	1x24 Jam	Peretasan website dan penambahan konten judi online pada website dishub	Suspend akun dishub, pengambil alihan google index, pembersihan konten dan pembersihan google index

No	Alamat url yang ternotifikasi/dilaporkan	Tanggal Kejadian	Sumber Laporan	Status Penanganan	Lama Waktu Penanganan	SLA	Temuan Hasil Investigasi/ Penyelidikan	Keterangan
9.	Penyusupan malware coinminer dan webshell pada server sidawai	17 Juli 2025	Pantauan Log firewall	Tertangani	1 hari	1x24 Jam	Scan server sidawai, ditemukan banyak sekali penyusupan script webshell dalam file-file foto pegawai dan file-file PDF kepegawaian juga ditemukan malware coinminer	Kontenerisasi server sidawai dengan disable NAT pada firewall
10.	subdomain take-over pada subdomain sidapri.blitarkab.go.id (103.27.206.21) dan sp.e-tani.blitarkab.go.id (207.180.224.178)	22 Juli 2025	Dorking	Tertangani	1 hari	1x24 Jam	dilakukan subdomain enumerator dan ditemukan subdomain sidapri.blitarkab.go.id (103.27.206.21) dan sp.e-tani.blitarkab.go.id (207.180.224.178), dengan IP publik yang tidak sesuai dengan IP publik yang dikelola Pemkab Blitar	Penghapusan DNS record sidapri.blitarkab.go.id (103.27.206.21) dan sp.e-tani.blitarkab.go.id (207.180.224.178) oleh pengelola DNS (APTIKA)

No	Alamat url yang ternotifikasi/dilaporkan	Tanggal Kejadian	Sumber Laporan	Status Penanganan	Lama Waktu Penanganan	SLA	Temuan Hasil Investigasi/ Penyelidikan	Keterangan
11.	Web defacement pada <a href="https://kel-babadan.blitarkab.go.id">https://kel-babadan.blitarkab.go.id</a>	11 Oktober 2025	Google dorking & notifikasi google index console melalui gmail	Tertangani	1 hari	1x24 Jam	Web defacement pada <a href="https://kel-babadan.blitarkab.go.id">https://kel-babadan.blitarkab.go.id</a>	Suspensi akun kel-babadan pada cpanel, pembersihan konten, perbaikan kerentanan website, dan pembersihan index pada google index console

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Sebagai tindak lanjut untuk mencegah insiden siber agar tidak terulang kembali maka dilakukan upaya perbaikan sistem dan penonaktifan plugin yang rentan. Adapun dalam proses penanganan insiden siber ditemukan kendala kurangnya SDM programmer untuk melakukan penulisan ulang kode program sesuai patch library kode program yang digunakan pada aplikasi web.

#### b. Perangkat Lunak Berbahaya (Malware)

Aduan siber terhadap serangan atau infeksi malware sebanyak Kabupaten Blitar dengan keberhasilan penanganan malware sebanyak Kabupaten Blitar sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2. Peretasan ini terjadi pada Sistem Elektronik dan/atau komputer pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.

Tabel 3.14.  
Penanganan *Malware* di Kab. Blitar

No	Jenis Malware	Tanggal Kejadian	Sumber Laporan	Jumlah Perangkat yang Terdampak	Metode Penanganan	Status Penanganan	Investigasi/ Penyelidikan	Keterangan
1.	Webshell & coinminer	17 Juli 2025	Log firewall	1 blade server	Kontenerisasi dengan matikan NAT pada firewall, Scan & pembersihan malware, Backup konten aplikasi & database, Format server, migrasi OS ke linux, restore konten aplikasi & database, lalu penambahan A record pada DNS intranet	Tertangani	Thorlite scanner	Insiden ditangani oleh TITIS-BlitarKab

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Sebagai upaya perbaikan dan untuk mencegah agar tidak terulang insiden siber tersebut maka dilakukan Kabupaten Blitar melakukan Kontenerisasi dengan matikan NAT pada firewall, Scan & pembersihan malware, Backup konten aplikasi & database, Format server, migrasi OS ke linux, restore konten aplikasi & database, lalu penambahan A record pada DNS intranet, penutupan port SSH dan database di sisi publik pada firwall serta penggantian password login dari server sesuai aturan dengan gabungan huruf kecil, huruf kapital, angka dan karakter spesial, serta melakukan pembatasan akses terhadap VPN *developer* dengan nonaktifkan akun pada router VPN, kemudian pada akhirnya menerapkan tidak memberikan akses VPN kepada developer dan perubahan versi aplikasi oleh developer hanya bisa dilakukan pada git milik Kabupaten Blitar. Staging dapat

dilakukan oleh Aptika bersama *developer* dan OPD dalam lingkungan *Sandbox* bukan produksi.

Adapun dalam upaya penanganan insiden siber dan upaya pencegahannya ditemukan kendala sebagai berikut :

- 1) Penerapan *End User Protection* & NDA developer tidak dibuat/dijalankan;
- 2) Keterbatasan Anggaran atas pengadaan Lisensi Anti Malware, Anti Virus, Firewall kelas Enterprise, serta lisensi akun CTI/threat hunting;
- 3) Keterbatasan SDM programmer untuk melakukan penulisan ulang kode program (*code rewrite & code review/SDLC*) sesuai patch CVE yang ada.
- 4) Pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani yakni memprioritaskan pada insiden dengan dampak dan tingkat yang Tinggi terlebih dahulu, kemudian Sedang, dan baru Rendah, dimana aplikasi web biasanya kita prioritaskan terlebih dahulu dibandingkan website.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan sesuai prosedur manajemen insiden yang ada.

### **Fungsi Tambahan meliputi :**

#### **1. Penanganan Kerentanan Sistem Elektronik**

Dalam Penanganan Kerentanan Sistem Elektronik yang dilakukan berupa identifikasi kerentanan, penilaian risiko atas kerentanan yang ditemukan, serta tindak lanjut untuk memperbaiki kerentanan. Upaya identifikasi dan penilaian keamanan dilakukan melalui kegiatan *IT Security Assessment* yang dilakukan oleh TiTIS-BlitarKab terhadap sistem elektronik yang memiliki profil risiko yang tinggi. sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3.15.  
Penanganan Kerentanan Sistem Elektronik

No.	Nama Sistem Elektronik	Link url Sistem Elektronik	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana ITSA	Status Kerentanan	Status Perbaikan/ Tindak Lanjut
1.	Aplikasi SIAP (E-sibtar) – Dinas Arsip	<a href="https://siap.blitarkab.go.id">https://siap.blitarkab.go.id</a> (lokal)	13 s.d 17 Januari 2025	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Temuan Kerentanan CRI : 1 MED: 3	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keseluruhan temuan sesuai dengan rekomendasi.
2.	Aplikasi One Data Desa – Dinas Kominfotiksan (bid. Statistik)	<a href="https://dashboard-desa.blitarkab.go.id">https://dashboard-desa.blitarkab.go.id</a>	12 s.d 20 Januari 2025	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Temuan Kerentanan CRI : 1 HIG : 2 MED: 3	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keseluruhan temuan sesuai dengan rekomendasi.
3.	Aplikasi SPMB Online (Dinas Pendidikan)	<a href="https://spm.blitarkab.go.id">https://spm.blitarkab.go.id</a>	2 s.d 4 Mei 2025	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Temuan Kerentanan CRI : 1	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keseluruhan temuan sesuai dengan rekomendasi.
4.	Aplikasi KRK Online (Dinas PUPR)	<a href="https://pupr-krk.blitarkab.go.id/">https://pupr-krk.blitarkab.go.id/</a>	19 s.d 28 November 2025	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Temuan Kerentanan HIG : 1 MED: 2	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keseluruhan temuan sesuai dengan rekomendasi.
5.	Aplikasi Siapnloss (Dinas PMPTSP)	<a href="https://siapnloss-dev.blitarkab.go.id">https://siapnloss-dev.blitarkab.go.id</a>	9 s.d 22 Desember 2025	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Temuan Kerentanan HIG : 1 MED: 1 LOW: 1	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keseluruhan temuan sesuai dengan rekomendasi.
6.	Aplikasi Sidatiz (Dinas PMPTSP)	<a href="https://sidatiz-dev.blitarkab.go.id">https://sidatiz-dev.blitarkab.go.id</a>	9 s.d 22 Desember 2025	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Temuan Kerentanan MED: 2 LOW: 2	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keseluruhan temuan sesuai dengan rekomendasi.

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil IT Security Assesment, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik *Kabupaten Blitar* melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Merekomendasikan untuk melakukan update paket terdistribusi resmi (kritikal);
- b. Merekomendasikan perbaikan versi bootstrap yang digunakan (Medium);
- c. Merekomendasikan perbaikan versi jQuery terbaru (Medium);
- d. Merekomendasikan menutup celah enumerasi file (Low);
- e. Merekomendasikan penggunaan file library dari vm lokal (Low);
- f. Merekomendasikan implementasi OWASP framework sebagai WAF di sisi VM;

g. Merekomendasikan internalisasi aplikasi klasifikasi rahasia untuk tidak dipasang subdomain dan IP publik.

2. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian terhadap Keamanan Siber.

Fungsi Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian terhadap Keamanan Siber bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepedulian pegawai Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap keamanan siber serta untuk meningkatkan kompetensi di bidang keamanan siber dan sandi. Program kegiatan Edukasi dan Pelatihan yang diselenggarakan berupa :

- a. Literasi Digital terkait keamanan siber yang dipublikasikan melalui media situs Website TiTIS-BlitarKab yang dapat diakses <https://titis.blitarkab.go.id> ;
- b. Surat Edaran berupa himbauan keamanan siber yang didistribusikan melalui email dinas;
- c. Webinar kewaspadaan terhadap serangan siber;
- d. Bimbingan Teknis penanggulangan insiden siber terhadap agen siber sebagai anggota TiTIS-BlitarKab Adapun rincian layanan Edukasi dan Pelatihan ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 3.16.  
Edukasi dan Pelatihan

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Target/Peserta Kegiatan	Keterangan
1.	Workshop Penguatan Infrastruktur Jaringan dan Keamanan di Lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Blitar	11 Januari 2025	DiskominfoKsa n Kab. Blitar	Bimtek Awareness	Agen Siber Kab. Blitar yang merupakan perwakilan dari masing-masing OPD	

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Target/Peserta Kegiatan	Keterangan
2.	Membangun budaya sadar keamanan informasi dan perlindungan data pribadi di lingkungan kerja sebagai bagian implementasi ISO/IEC 27001:2022	29 September 2025	Kab. Blitar	Bimtek	Agen Siber Kab. Blitar yang merupakan perwakilan dari masing-masing OPD	PDP
3.	Bootcamp Penetration Testing & Cyber Security Engineer	28 Oktober – 4 Desember 2025	XCODE – Jogja	Bootcamp	Umum	

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran **Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE** adalah sebesar Rp8.319.219.971,00 dengan realisasi sebesar Rp8.130.713.934,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran

Tabel 3.17.

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Tata Kelola dan Layanan SPBE

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	119,25%	<b>PROGRAM:</b> PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.527.626.971	2.469.066.391	97.68
			<b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.527.626.971	2.469.066.391	97.68
			Pelayanan Informasi Publik	269.591.500	267.417.000	99.19

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	406.783.800	387.209.644	95.19
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.851.251.671	1.814.439.747	98.01
			<b>PROGRAM:</b> PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.857.391.500	4.730.477.155	97.39
			<b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.271.164.300	4.201.793.943	98.38
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	4.271.164.300	4.201.793.943	98.38
			<b>Kegiatan:</b> Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	586.227.200	528.683.212	90.18
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	44.354.400	43.481.023	98.03

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	36.579.000	33.080.287	90.44
			Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	114.749.900	110.256.487	96.08
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	350.669.100	307.858.076	87.79
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	14.837.000	13.117.614	88.41
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	25.037.800	20.889.725	83.43
			<b>PROGRAM :</b> PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	573.998.900	572.505.45	99.74
			<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	573.998.900	572.505.45	99.74
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	71.883.500	71.015.930	98.79

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	4.088.800	4.045.000	98.93
			Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	31.241.000	30.780.000	98.52
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	432.178.000	432.093.32	99.98
			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	34.607.600	34.571.200	99.89
			<b>PROGRAM:</b> PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	360.202.600	358.664.938	99.57
			<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	360.202.600	358.664.938	99.57
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	360.202.600	358.664.938	99.57
<b>Tingkat efisiensi (%)</b>						1,42

Sumber: Dinas Kominfo, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran **Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE** Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 119.25% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 98.58%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dengan nilai efisiensi sebesar 1.42%.

## ***B. Realisasi Anggaran***

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar untuk Tahun Anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.18  
Realisasi Keuangan

No.	Sasaran	Program	Anggaran		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.586.607.499	5.014.231.948	89.75
2	<b>Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE</b>	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.527.626.971	2.469.066.391	97.68
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.857.391.500	4.730.477.155	97.39
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	573.998.900	572.505.45	99.74

		PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	360.202.600	358.664.938	99.57
--	--	---	-------------	-------------	-------

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi kelancaran realisasi keuangan. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain:

**1. Proses Administrasi**

Mekanisme pencairan anggaran yang membutuhkan tahapan verifikasi berlapis dan kesalahan dalam penyusunan sering kali memperlambat pelaksanaan kegiatan. Perubahan regulasi atau penyesuaian kebijakan juga menuntut adaptasi cepat dari unit kerja.

**2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Kapasitas dan distribusi SDM yang belum merata menyebabkan beban kerja tidak seimbang. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen pertanggungjawaban maupun pelaksanaan kegiatan.

**3. Koordinasi Antar Unit**

Kurangnya sinkronisasi antar bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menimbulkan hambatan teknis, seperti keterlambatan pengadaan barang/jasa atau ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan.

**4. Faktor Eksternal**

Kondisi lingkungan, seperti dinamika ekonomi, perubahan harga, atau keterbatasan mitra kerja, hingga cuaca yang tidak menentu turut memengaruhi kelancaran realisasi kinerja dan keuangan.

Langkah Perbaikan dan Solusi Untuk mengatasi kendala tersebut, instansi pemerintah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain:

**1. Peningkatan Kapasitas SDM**

Melakukan pelatihan, pendampingan, serta penataan beban kerja agar pegawai lebih siap menghadapi tuntutan administrasi dan teknis.

**2. Penguatan Koordinasi**

Menetapkan mekanisme komunikasi yang lebih intensif antar unit, termasuk rapat koordinasi berkala untuk memastikan kesesuaian jadwal dan target.

**3. Manajemen Risiko dan Fleksibilitas Anggaran**

Menyusun strategi antisipasi terhadap faktor eksternal dengan menyiapkan alternatif pelaksanaan kegiatan serta menyesuaikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan prioritas.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan dengan memperhatikan pengelompokan nilai serta predikat kinerja yang telah ditetapkan. Analisis terhadap capaian tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang beragam, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penilaian. Dengan demikian, hasil evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pelaksanaan program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah), 2025

Selanjutnya, pengelompokan nilai dan predikat kinerja tersebut menjadi dasar untuk menilai efektivitas serta konsistensi pencapaian tujuan organisasi. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan tingkat keberhasilan, tetapi juga menjadi acuan dalam merumuskan langkah perbaikan dan strategi peningkatan di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, evaluasi kinerja dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam memastikan keberlanjutan serta peningkatan mutu pelaksanaan program.

Kesimpulan berdasarkan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya maksimal dan seoptimal mungkin dengan berbagai kondisi yang mungkin cukup sulit untuk dihadapi. Namun dengan komitmen kuat dan kerja keras serta kolaborasi dari berbagai elemen dapat mewujudkan kinerja perangkat daerah yang akuntabel, efektif dan efisien serta terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, adapun penilaian terhadap skala mandiri dalam pencapaian peringkat kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025 diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72,5)	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	3.3	132%	Sangat Tinggi
		Nilai Layanan SPBE	4.26	106.5%	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata capaian kinerja PD</b>				<b>119,25%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan berdasarkan format skala mandiri yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Pada aspek peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, nilai SAKIP perangkat daerah mencapai predikat BB (72,5) dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang menegaskan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal ini

menjadi indikator penting bahwa perangkat daerah telah mampu melaksanakan prinsip-prinsip manajemen kinerja secara konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan. Walaupun capaian kinerja sudah mencapai target, akan tetap dilakukan optimalisasi kinerja perangkat daerah hingga terpenuhi target maksimal yaitu predikat AA. Upaya untuk terus meningkatkan target ini bukan hanya angan semata tetapi juga sebagai bentuk semangat untuk terus meningkatkan kinerja terbaik dalam pemerintah yang kemudian berimplikasi kepada pelayanan untuk masyarakat.

Selanjutnya, pada sasaran peningkatan tata kelola dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Nilai tata kelola SPBE tercatat sebesar 3,3 dengan capaian 132%, sedangkan nilai layanan SPBE mencapai 4,26 dengan capaian 106,5%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja perangkat daerah berada pada angka 119,25%, yang dikategorikan sebagai Sangat Tinggi. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mengintegrasikan tata kelola pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi, sekaligus memperkuat kualitas layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Lebih jauh lagi, capaian kinerja yang sangat tinggi berdasarkan skala mandiri ini menjadi bukti nyata bahwa perangkat daerah telah menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan program prioritas serta mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan. Keberhasilan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi landasan penting bagi pengembangan strategi jangka panjang dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, evaluasi kinerja ini dapat dijadikan pijakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kualitas tata kelola serta meningkatkan daya saing daerah di masa mendatang.

## B. Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan capaian kinerja Ditemukan bahwa kinerja dapat tercapai sesuai target, namun terdapat berbagai kendala menjadi hambatan yang menyebabkan adanya kesulitan dalam mencapai target. sehingga untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar. Berikut rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja dan kendala/permasalahan yang dihadapi.

Tabel 4.3  
Rencana Tindak Lanjut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang sesuai.</li><li>2. Optimalisasi Pengelolaan SDM yang ada dengan melakukan peningkatan kapasitas yang mendorong budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi hasil maksimal.</li><li>3. Terus berusaha menciptakan pengelolaan kesekretariatan yang terdigitalisasi dengan ditopang oleh SDM yang handal.</li><li>4. mengintensivkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap serapan anggaran dan capaian target kinerja bidang teknis dan kesekretariatan.</li></ol>

2.	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan reviu dan pemutakhiran arsitektur serta peta rencana SPBE secara berkala.</li> <li>2. Meningkatkan integrasi dan standarisasi aplikasi perangkat daerah sesuai arsitektur SPBE.</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM TIK melalui bimbingan teknis dan pendampingan berkelanjutan.</li> <li>4. Mengoptimalkan pemanfaatan website dan media digital perangkat daerah sebagai sarana layanan administrasi pemerintahan dan informasi publik.</li> <li>5. koordinati dan kolaborasi yang aktif setiap perangkat daerah dalam menciptakan dan memanfaatkan digitalisasi pelayanan yang aman dari gangguan cyber.</li> </ol>
		Nilai Layanan SPBE	

Sumber: Dinas Kominfotiksan, 2025

Berdasarkan capaian kinerja terlihat bahwa target kinerja secara umum telah tercapai sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang menjadi hambatan dalam proses pencapaian, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mencapai target secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan rencana, masih diperlukan upaya perbaikan dan penguatan agar kinerja di masa mendatang dapat lebih konsisten untuk ditingkatkan dan terus berkelanjutan.

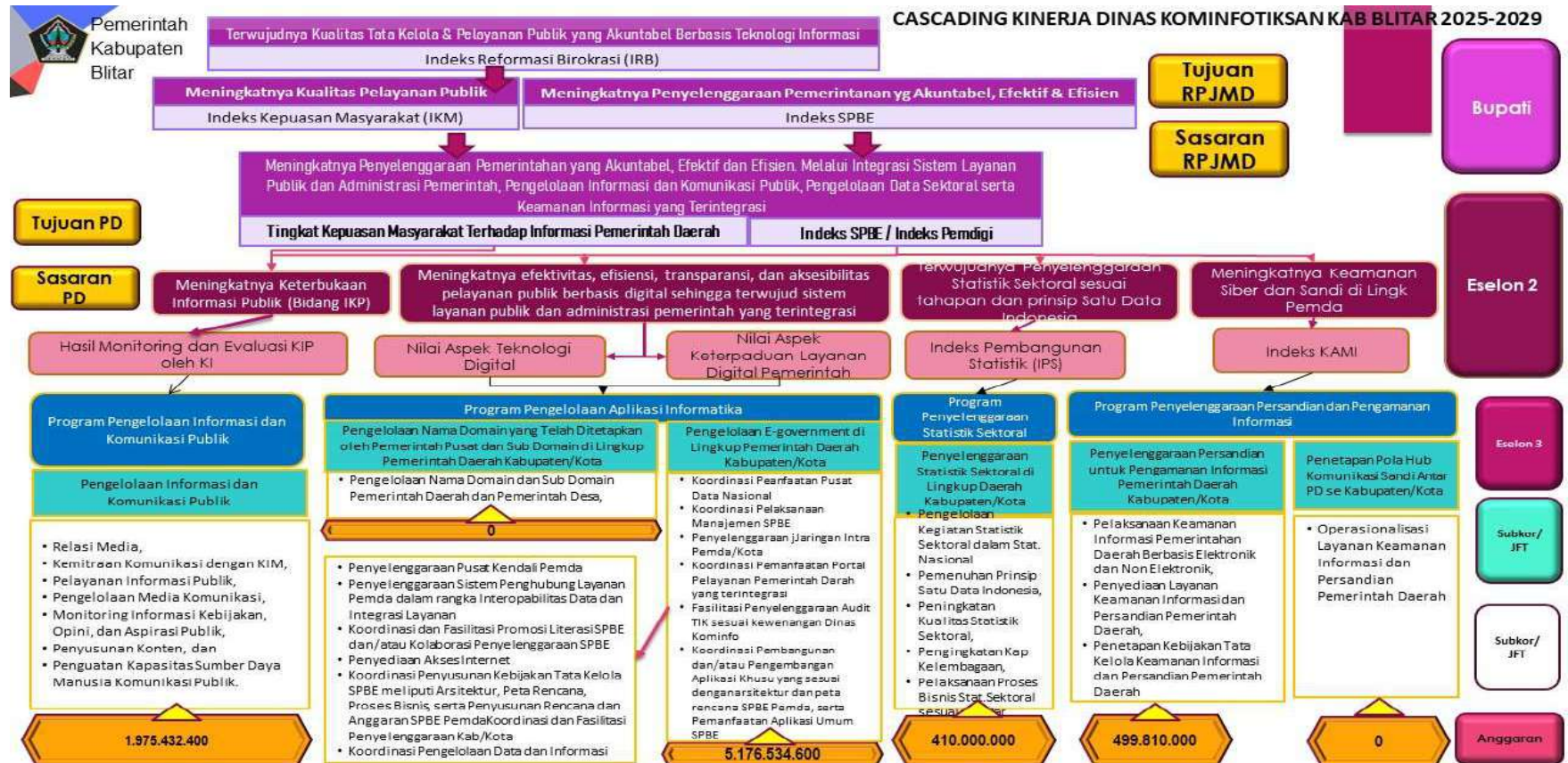
Untuk itu, Rencana tindak lanjut ini disusun berdasarkan analisis capaian kinerja serta identifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten

Blitar pada Tahun 2025. Dengan adanya tindak lanjut yang terencana, diharapkan setiap kelemahan dapat diminimalisasi, hambatan dapat diatasi, serta peluang peningkatan kinerja dapat dimaksimalkan. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan sasaran strategis yang lebih efektif, efisien, dan berdaya guna bagi masyarakat



## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### A. Pohon Kinerja





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Sudanco Supriadi Nomor 17 Blitar, Telepon (0342) 555955  
Pos-el : [kominfo@blitarkab.go.id](mailto:kominfo@blitarkab.go.id), Laman : [www.kominfo.blitarkab.go.id](http://www.kominfo.blitarkab.go.id)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : B/555/59/409.23.1/KPTS/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar;  
b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nlitar Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.

- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 30 September 2025  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN BLITAR



HERMAN WIDODO, S.H.  
Pembinda Utama Muda / IV.c  
NIP.196509161991121001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi  
Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten  
Blitar  
Nomor : B/555/59/409.23.1/KPTS/2025  
Tanggal : 30 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2025-2029

Nama PD	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BLITAR	
Tugas	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Persandian, dan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Statistik	
Fungsi	:	1.	Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
		2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
		3.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
		4.	Pelaksanaan administrasi dinas;
		5.	Pembinaan UPTD; dan
		6.	Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

<b>NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN RENSTRA PD</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PD</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>BIDANG/ PROGRAM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektoral serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi	Merupakan suatu kondisi dimana suatu badan publik menunjukkan peningkatan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan, mengumumkan dan melayani permintaan informasi publik secara proaktif, cepat, tepat waktu, dan transparan, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008 atau UU KIP. Rilis Komisi Informasi Jawa Timur	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  Program: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Indek SPBE (ditetapkan menggunakan Pemdigi)/ Indek Pemdigi		Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Nilai Aspek Teknologi Digital (skor)	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indek Pemerintah Digital untuk tahun 2026-2030, untuk tahun 2025 masih menggunakan indek SPBE dengan indikator yang lama yaitu pada Domain Tata kelola SPBE sub Teknologi Informasi dan Komunikasi. Target pada tahun 2026 berbeda karena sudah menggunakan indek yang baru. Target nasional untuk tahun 2025: 3 dan 2028 : 2 Skor (skala 0-5) sumber data : penilaian Menpan	Bidang Aplikasi Informatika  Program: Pengelolaan Aplikasi Informatika Bidang Aplikasi Informatika  Program: Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (skor)	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indek Pemerintah Digital untuk tahun 2026-2030, untuk tahun 2025 masih menggunakan indek SPBE dengan indikator yang lama yaitu pada Domain Tata kelola SPBE sub Teknologi Informasi dan Komunikasi. Target pada tahun 2026 berbeda karena sudah menggunakan indek yang baru. Target nasional untuk tahun 2025: 3 dan 2028 : 2 Skor (skala 0-5) sumber data : penilaian Menpan	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Bidang Statistik  Program: Pengelolaan Statistik Sektoral

<b>NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN RENSTRA PD</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PD</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>BIDANG/ PROGRAM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks KAMI adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan (maturity level) penerapan keamanan informasi pada suatu instansi, berdasarkan aspek-aspek : tata kelola, manajemen risiko, pengendalian teknologi, serta kesadaran dan budaya keamanan informasi. Skor 0-100 dengan sumber data dari BSSN Indeks berkisar 0 hingga 100 Belum Siap (0-25), Kurang Siap (25-50, Cukup Siap (51-65, Siap (66-80, Sangat Siap 81-100 Rilis BSSN	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi  Program: Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi
	Skor SAKIP Pemerintah Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.	Skor SAKIP Perangkat Daerah	Merupakan ukuran tingkat akuntabilitas kinerja, yaitu sejauh mana perangkat daerah mampu menunjukkan keterkaitan yang logis dan terukur antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil (outcome) dari program dan kegiatan yang dilakukannya, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis kinerja	Sekretariat Dinas  Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Ditetapkan di : Blitar  
 Pada Tanggal : 30 September 2025  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
 KABUPATEN BLITAR



HERMAN WIDODO, S.H.  
 Pembina Utama Muda / IV.c  
 NIP.196509161991121001



**DOKUMEN RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2025  
BAGIAN SEKRETARIAT PADA DINAS KOMINFOTIKSAN KABUPATEN BLITAR**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		TARGET KEUANGAN (Rupiah)	
			Januari	(Target)			Januari				Januari				Januari			Januari
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Indeks SPBE	Januari	(Target)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Januari		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	Januari		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Januari		35,437,884	
			Februari	(Target)			Februari				Februari				Februari			
			Maret	(Target)			Maret				Maret				Maret			
			April	(Target)			April				April				April			
			Mei	(Target)			Mei				Mei				Mei			
			Juni	(Target)			Juni				Juni	7			Juni			
			Juli	(Target)			Juli				Juli				Juli	54		
			Agustus	(Target)			Agustus				Agustus				Agustus			
			September	(Target)			September				September				September			
			Oktober	(Target)			Oktober				Oktober				Oktober			
			November	(Target)			November				November				November			
			Desember	(Target)			Desember				Desember				Desember			
													Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Januari	100%*	82,309,400		
														Februari			Februari	
														Maret			Maret	
														April			April	
														Mei			Mei	
														Juni			Juni	
														Juli			Juli	
														Agustus			Agustus	
														September			September	
														Oktober			Oktober	
														November			November	
														Desember			Desember	
								Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Januari		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Januari	28	3,267,649,134		
										Februari				Februari	28			
										Maret				Maret	28			
										April				April	28			
										Mei				Mei	28			
										Juni				Juni	28			
										Juli				Juli	28			
										Agustus				Agustus	28			
										September				September	28			
										Oktober				Oktober	28			
										November				November	28			
										Desember				Desember	28			
													Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Januari		1,363,950		
														Februari			Februari	
														Maret			Maret	
														April			April	
														Mei			Mei	
														Juni			Juni	
														Juli	4		Juli	4
														Agustus			Agustus	
														September			September	
														Oktober	15		Oktober	15
														November	1		November	1
														Desember			Desember	
													Tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Januari	10	38,000,000		
														Februari			Februari	
														Maret			Maret	
														April	10		April	10
														Mei			Mei	
														Juni			Juni	
														Juli	10		Juli	10
														Agustus			Agustus	
														September			September	
														Oktober	0		Oktober	0

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)	TARGET KEUANGAN (Rupiah)
												November	
												Desember	
							Tercapainya	Persentase	100	Tersedianya bahan bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,750,000	1,750,000
							Kecukupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,750,000	
												Januari	
												Februari	
												Maret	
												April	
												Mei	
												Juni	
												Juli	
												Agustus	
												September	
												Oktober	
												November	
												Desember	
												Januari	28,913,940
												Februari	
												Maret	
												April	
												Mei	
												Juni	
												Juli	
												Agustus	
												September	
												Oktober	
												November	
												Desember	
												Januari	128,748,600
												Februari	
												Maret	
												April	
												Mei	
												Juni	
												Juli	
												Agustus	
												September	
												Oktober	
												November	
												Desember	
												Januari	4,317,500
												Februari	
												Maret	
												April	
												Mei	
												Juni	
												Juli	
												Agustus	
												September	
												Oktober	
												November	
												Desember	
												Januari	101,030,800
												Februari	
												Maret	
												April	
												Mei	
												Juni	
												Juli	
												Agustus	
												September	
												Oktober	
												November	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)	TARGET KEUANGAN (Rupiah)
												Desember	
												Januari	21,827,300
												Februari	
												Maret	
												April	
												Mei	
												Juni	
												Juli	
												Agustus	
												September	
												Oktober	
												November	
												Desember	
							Tertindakannya pemenuhan pengadaan barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Januari	27,008,500
												Februari	
												Maret	
												April	
												Mei	
												Juni	
												Juli	
												Agustus	
												September	
												Oktober	
												November	
												Desember	
							Tercapainya kecukupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Januari	2,980,000
												Februari	
												Maret	
												April	
												Mei	
												Juni	
												Juli	
												Agustus	
												September	
												Oktober	
												November	
												Desember	
												Januari	691,744,416
												Februari	
												Maret	
												April	
												Mei	
												Juni	
												Juli	
												Agustus	
												September	
												Oktober	
												November	
												Desember	
												Januari	66,620,400
												Februari	
												Maret	
												April	
												Mei	
												Juni	
												Juli	
												Agustus	
												September	
												Oktober	
												November	
												Desember	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		TARGET KEUANGAN (Rupiah)
									Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi dengan baik	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember	100	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember		128,910,000
													Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember		155,547,860
									Terpenuhinya kecukupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember		Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember		85,970,000

Blitar, 09 September 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian Kab. Blitar



**HERMAN WIDODO, S.H.**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199112 1 001

**DOKUMEN AKSI/KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025  
BAGIAN SEKRETARIAT PADA DINAS KOMINFOTIKSAN KABUPATEN BLITAR**

No	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN KE-)												OUTPUT / KELUARAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															
1.	<b>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>														
	rapat koordinasi penyusunan renja 25	■													dokumen renja 2025
	menyusun SPJ		■												dokumen SPJ 2025
	rapat koordinasi penyusunan rancangan teknokratis			■											dokumen rantek renstra 2025-2029
	rapat koordinasipenyusunan ranwal renstra PD				■										dokumen ranwal renstra PD
	penyepakatan kertas kerja renstra					■									kertas kerja renstra revisi
	input renstra ke dalam SIPD						■	■							isian SIPD sebagian
2.	<b>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>														
	rapat koordinasi evaluasi internal serapan anggaran	■													dokumen evaluasi anggaran
	rapat koordinasi penyusunan LKjIP 2024 di 2025		■												dokumen LKjIP
	rapat koordinasi reformasi birokrasi			■											dokumen isian RB di Bagian Organisasi
	penyusunan SPJ				■										dokumen SPJ
	rapat koordinasi capaian kinerja					■	■	■							dokumen kelengkapan capaian kinerja
	rapat koordinasi perubahan anggaran 2025						■	■							RKA 2025
	rapat koordinasi evaluasi penyusunan risk register							■							Kertas Kerja Risk Register 2025
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															
1.	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>														
	menyusun SPJ Gaji dan TPP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	dokumen SPJ
2.	<b>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>														
	evaluasi serapan anggaran	■													dokumen serapan anggaran ke Bagian Adpem
	rekonsiliasi dengan BPKAD		■												berita acara rekonsiliasi
	menyusun laporan keuangan 2024			■											laporan keuangan OPD 2024

	koordinasi serapan tribulan I														laporan serapan anggaran tribulan I
	menyusun bahan RKAP 2025														rancangan RKA 2025 perubahan
	menyusun laporan prognosis semester I														laporan prognosis semester I
	inputing RKAP 2025														hasil inputan SIPD berupa RKAP 2025 yang belum disahkan
3.	<b>Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</b>														
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>														
															SPJ Bahan Bacaan
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>														
															SPJ Barang Cetak dan Penggandaan
	<b>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>														
															SPJ Rapat
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>														
															SPJ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>														
															SPJ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>														
															SPJ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															
	<b>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan</b>														
															SPJ Pengadaan
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>															
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>														
															SPJ Jasa Surat Menyurat
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>														
															SPJ Jasa Pelayanan Umum
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>														



**DOKUMEN RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMINFOTIKSAN KABUPATEN BLITAR**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		TARGET KEUANGAN (Rupiah)
			Januari	(Target)			Januari				Januari				Januari		
			Januari	(Target)	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	Januari	85.53	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	Januari	96.32%	Terselenggaranya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Januari	2	20,405,000
		Februari	(Target)	Februari			Februari				Februari				28,290,000		
		Maret	(Target)	Maret			Maret				Maret				20,405,000		
		April	(Target)	April			April				April				49,720,000		
		Mei	(Target)	Mei			Mei				Mei				20,705,000		
		Juni	(Target)	Juni			Juni				Juni				20,605,000		
		Juli	(Target)	Juli			Juli				Juli				30,680,000		
		Agustus	(Target)	Agustus			Agustus				Agustus				20,755,000		
		September	(Target)	September			September				September				20,755,000		
		Oktober	(Target)	Oktober			Oktober				Oktober				20,705,000		
		November	(Target)	November			November				November				21,005,000		
		Desember	(Target)	Desember			Desember				Desember				20,405,000		
																955,000	
																91,349,000	
																130,955,000	
																222,093,800	
																95,121,000	
																70,955,000	
																115,405,000	
																118,029,000	
																161,533,000	
																197,355,000	
																151,283,000	
																95,995,000	
																24,800,000	
																25,370,000	
																16,500,000	
																19,750,000	
																16,500,000	
																16,500,000	
																16,500,000	
																16,500,000	
																16,500,000	
																16,500,000	
																16,500,000	
																16,500,000	
																16,500,000	

Blitar, 09 September 2025

Mengetahui,  
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
 Statistik dan Persandian Kab. Blitar



**HERMAN WIDODO, S.H.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650916 199112 1 001

**DOKUMEN AKSI/KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**BIDANG STATISTIK PADA DINAS KOMINFOTIKSAN KABUPATEN BLITAR**

No	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN KE-)												OUTPUT / KELUARAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</b>														
	Pembaharuan lisensi aplikasi pendukung pembuatan content													1 Dokumen Pengadaan
	Fasilitasi pembiayaan honorarium LPPL Persada													Dokumen SPJ
	Literasi Digital Kominfo Goes to School													1 Kegiatan
	Bimbingan Teknis Admin Media Sosial PD, Desa dan Kelurahan													1 Kegiatan
	Community Gathering bersama Penggiat Media Sosial													1 Kegiatan
	Penyusunan Laporan Monitoring Opini Publik													1 Dokumen
<b>Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>														
	Community Gathering bersama Insan Media													1 Dokumen reuiu
	Belanja Publikasi Media													Dokumen SPJ dan Hasil Publikasi
	Community Gathering bersama Insan Media - Pers Tour													1 Kegiatan
	Community Gathering bersama Insan Media													1 Kegiatan
	Penyusunan Laporan Pengelolaan Media Komunikasi													1 Dokumen
<b>Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik</b>														
	Pembaharuan sewa layanan call center 112													1 Dokumen Pengadaan
	Fasilitasi pembiayaan sewa layanan call center 112													Dokumen SPJ
	Penyelenggaraan Meja Layanan Informasi dan Dokumentasi													Layanan
	Penyelenggaraan Koordinasi Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)													Layanan
	Bimbingan Teknis PPID Utama, PPID Pelaksana PD, Desa Kabupaten Blitar													1 Kegiatan
	Bimbingan Teknis Admin SP4N-Lapor													1 Kegiatan
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Layanan Informasi dan													1 Dokumen

Blitar, 09 September 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kab. Blitar



**HERMAN WIDODO, S.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199112 1 001



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA (Target Akhir dan	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan	TARGET KEUANGAN (Rupiah)	
									Desember (Target)			Desember		
									Januari (Target)	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi layanan SPBE	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan SPBE	Januari	1 Dokumen	
								Februari (Target)	Februari					
								Maret (Target)	Maret					
								April (Target)	April					
								Mei (Target)	Mei					
								Juni (Target)	Juni			160.000,00		
								Juli (Target)	Juli			160.000,00		
								Agustus (Target)	Agustus			8.935.800,00		
								September (Target)	September					
								Oktober (Target)	Oktober			3.079.150,00		
								November (Target)	November					
								Desember (Target)	Desember					
								Januari (Target)	Terlaksananya kegiatan smart city dan smart village di Kabupaten Blitar	Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi kegiatan smart city	Januari	4 OPD		
								Februari (Target)			Februari			
								Maret (Target)			Maret			
								April (Target)			April			
								Mei (Target)			Mei			
								Juni (Target)			Juni		160.000,00	
								Juli (Target)			Juli		160.000,00	
								Agustus (Target)			Agustus		160.000,00	
								September (Target)			September		1.732.000,00	
								Oktober (Target)			Oktober		3.079.150,00	
								November (Target)			November		1.732.000,00	
								Desember (Target)			Desember			
								Januari (Target)	Terlaksananya pengembangan satu portal pelayanan publik dan administrasi pemerintah di Kabupaten Blitar	Jumlah laporan pengembangan satu portal pelayanan publik dan administrasi pemerintah	Januari	2 Laporan	114.438.000,00	
								Februari (Target)			Februari		805.000,00	
								Maret (Target)			Maret		805.000,00	
								April (Target)			April		203.265.000,00	
								Mei (Target)			Mei		1.125.000,00	
								Juni (Target)			Juni		1.125.000,00	
								Juli (Target)			Juli		16.367.400,00	
								Agustus (Target)			Agustus		805.000,00	
								September (Target)			September		15.198.400,00	
								Oktober (Target)			Oktober		805.000,00	
								November (Target)			November		805.000,00	
								Desember (Target)			Desember		805.000,00	

Blitar, 09 September 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian Kab. Blitar



**HERMAN WIDODO, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650916 199112 1 001

**DOKUMEN AKSI/KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**BIDANG APTIKA PADA DINAS KOMINFOTIKSAN KABUPATEN BLITAR**

No	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN KE-)												OUTPUT / KELUARAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional</b>														
	Pengadaan Harddisk dan Bracket													Bracket
<b>Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda</b>														
	Pelaksanaan Bimtek/Pelaksanaan Musrenbang													Laporan Kegiatan
<b>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</b>														
	Koordinasi dan Bimtek penggunaan SPLP													Laporan Kegiatan
<b>Sub Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas</b>														
	Belanja Lisensi Zoom Kapasitas 500 Participan													Dokumen Belanja Lisensi Zoom

Blitar, 09 September 2025  
Mengetahui,  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian Kab. Blitar



**HERMAN WIDODO, S.H.**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19650916 199112 1 001

**DOKUMEN AKSI/KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**BIDANG STATISTIK PADA DINAS KOMINFOTIKSAN KABUPATEN BLITAR**

No	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN KE-)												OUTPUT / KELUARAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</b>														
	<b><i>Pelaksanaan Rakor SDI</i></b>													
	Membuat KAK													1 Dokumen KAK
	Membuat Nota Dinas													1 Dokumen Nota Dinas
	Membuat Surat													3 Dokumen
	Koordinasi IKP desain banner dan cetak banner													1 Buah Banner
	Membentuk Panitia Pelaksanaan kegiatan													1 SK Panitia
	koordinasi terkait SPJ													1 Dokumen Notulen Persiapan SPJ
	Menyusun SPJ													1 Dokumen SPJ
	<b><i>Pelaksanaan Executive Meeting SDI</i></b>													
	Membuat KAK													1 Dokumen KAK
	Membuat Nota Dinas													1 Dokumen Nota Dinas
	Membuat Surat													3 Dokumen
	Koordinasi IKP desain banner dan cetak banner													1 Buah Banner
	Membentuk Panitia Pelaksanaan kegiatan													1 SK Panitia
	koordinasi terkait SPJ													1 Dokumen Notulen Persiapan SPJ
	Menyusun SPJ													1 Dokumen SPJ
<b>Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional</b>														
	<b><i>Pelaksanaan Harmoni Data</i></b>													
	Melakukan Reviu Kegiatan Tahun lalu													1 Dokumen reviu
	Menyusun RATL perbaikan penyelenggaraan kegiatan													1 Dokumen RATL
	Membuat Juknis Kegiatan													1 Dokumen Juknis
	Membuat Nota Dinas													1 Dokumen Nota Dinas
	Membuat Surat kepada SKPD													3 Dokumen (surat undangan/permohonan/tembusan SKPD)
	Membuat Flyer Statis dan Video Flyer													2 Dokumen (1 flyer statis + 1 video flyer)
	Rapat Technical Meeting (Zoom)													Notulensi/Risalah TM
	Pendampingan Perangkat Daerah													Dokumentasi kegiatan (foto/laporan singkat)
	Membuat aplikasi Harmoni Data													1 Aplikasi berbasis web/spreadsheet
	Membuat Form Penjurian dan aplikasi penjurian													1 Form penjurian + 1 tools penjurian
	Technical Meeting untuk Juri													Notulensi TM Juri
	Kompilasi Hasil Penjurian													1 Dokumen hasil penjurian
	Rapat untuk Pengumuman Pemenang													Daftar hadir + dokumentasi rapat
	Membuat Flyer Pemenang													1 Flyer hasil desain
	Membuat desain piagam juara													File desain piagam
	Cetak piagam juara dan menempelkan pada sterofoam													Hasil cetak piagam & sterofoam
	membuat KAK dan surat undangan Acara pengumuman													1 KAK + 1 Surat undangan











**DOKUMEN RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2025  
 BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI PADA DINAS KOMINFOTIKSAN KABUPATEN BLITAR**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (Target Akhir dan Satuan)		TARGET KEUANGAN (Rupiah)
			Januari	(Target)			Januari	(Target)			Januari	(Target)			Januari	(Target)	
1			Januari	(Target)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ; Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur	Januari	100%	Terselenggaranya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan backbone pemkab blitar	Januari	100%	Terselenggaranya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggara n Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Januari	1 dok	1,105,000
			Februari	(Target)			Februari				353,208,000						
			Maret	(Target)			Maret				343,088,000						
			April	(Target)			April				343,088,000						
			Mei	(Target)			Mei				452,418,000						
			Juni	(Target)			Juni				343,088,000						
			Juli	(Target)			Juli				343,088,000						
			Agustus	(Target)			Agustus				343,088,000						
			September	(Target)			September				343,088,000						
			Oktober	(Target)			Oktober				343,088,000						
			November	(Target)			November				343,088,000						
			Desember	(Target)			Desember				685,053,500						
2			Januari			Terwujudnya kepatuhan terhadap standart keamanan informasi perangkat daerah	Januari	1 dok	Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKl)	Januari	1 dok	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Januari	12 dok	705,000
			Februari				Februari				35,514,300						
			Maret				Maret				27,964,300						
			April				April				22,064,300						
			Mei				Mei				98,684,300						
			Juni				Juni				22,064,300						
			Juli				Juli				22,064,300						
			Agustus				Agustus				37,713,100						
			September				September				22,064,300						
			Oktober				Oktober				22,064,300						
			November				November				27,064,300						
			Desember				Desember				43,423,600						

Blitar, 09 September 2025  
 Mengetahui,  
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
 Statistik dan Persandian Kab. Blitar



**HERMAN WIDODO, S.H.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650916 199112 1 001

**DOKUMEN AKSI/KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI PADA DINAS KOMINFOTIKSAN KABUPATEN BLITAR**

No	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN KE-)												OUTPUT / KELUARAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa</b>														
	<b>Pengadaan Jaringan Internet</b>													
	Koordinasi dengan PBJ dan Pihak Penyedia													1 Dokumen KAK
	Membuat dokumen kontrak													1 Dokumen Kontrak
	Menyusun dokumen pencairan													12 Dokumen Pencairan
	Membentuk Panitia Pelaksanaan kegiatan													1 SK Panitia
	koordinasi terkait SPJ													12 Dokumen SPJ
	Menyusun SPJ													12 Dokumen SPJ
	<b>Pengadaan Peralatan Jaringan 4 Desa hasil Musrenbang</b>													
	Koordinasi dengan PBJ dan Pihak Penyedia													1 Dokumen KAK
	Membuat dokumen kontrak													1 Dokumen Kontrak
	Menyusun dokumen pencairan													1 Dokumen Pencairan
	koordinasi terkait SPJ													1 Dokumen SPJ
	Menyusun SPJ													1 Dokumen SPJ
	<b>Distribusi Bandwidth ke 159 site</b>													
	Menyusun tabel site distribusi													1 Dokumen Titik - titik layanan Internet
	Konfigurasi perangkat OLT, router distribusi dan GPON site													1 Dokumen konfigurasi
	Pengujian link													1 Dokumen pengujian
	<b>Pemeliharaan Jaringan Internet</b>													
	Menerima layanan pengaduan gangguan internet'													12 Dokumen troubleshooting jaringan
	Pemeriksaan sesuai aduan gangguan													12 Dokumen troubleshooting jaringan
	Perbaikan gangguan jaringan													12 Dokumen troubleshooting jaringan
<b>Sub Kegiatan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</b>														
	<b>Pengadaan Sewa dan Managed Service Firewall</b>													
	Koordinasi dengan PBJ dan Pihak Penyedia													1 Dokumen KAK
	Membuat dokumen kontrak													1 Dokumen Kontrak
	Menyusun dokumen pencairan													12 Dokumen Pencairan
	Membentuk Panitia Pelaksanaan kegiatan													1 SK Panitia
	koordinasi terkait SPJ													12 Dokumen SPJ
	Menyusun SPJ													12 Dokumen SPJ
	<b>Pengadaan Jasa Konsultasi Pendampingan ISO 27001:2022</b>													
	Koordinasi dengan PBJ dan Pihak Penyedia													1 Dokumen KAK
	Membuat dokumen kontrak													1 Dokumen Kontrak
	Pelaksanaan pendampingan sertifikasi ISO 27001:2022													1 Dokumen sertifikasi ISO 27001:2022
	Menyusun dokumen pencairan													1 Dokumen Pencairan
	koordinasi terkait SPJ													1 Dokumen SPJ
	Menyusun SPJ													1 Dokumen SPJ
	<b>Monitoring Keamanan Informasi Sistem Elektronik</b>													
	Identifikasi aset sistem elektronik													1 Dokumen identifikasi aset
	Identifikasi ancaman													1 Dokumen identifikasi ancaman
	Monitoring ancaman melalui tools yang sudah disusun yaitu SIEM													12 Dokumen monitoring
	Pembuatan daftar blocking IOC (Indikator of Compromise)													12 Dokumen daftar blocking IOC
	Dokumentasi dan pelaporan insiden													12 Dokumen pelaporan insiden

Blitar, 09 Septmber 2025

Mengetahui,  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.



**HERMAN WIDODO, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650916 199112 1 001